STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA TAPIAN TABIANG BARASOK DI BUKITTINGGI BERBASIS *COMMUNITY BASED TOURISM*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Pariwisata Syariah

Disusun Oleh:

HAFIF VERDIAN
NIM: 3519091

PROGAM STUDI PARIWISATA SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2026

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Strategi Pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok Di Bukittinggi Berbasis *Community Based Tourism***" yang disusun oleh Hafif Verdian NIM 3591091 Program Studi Pariwisata Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok di Kota Bukittinggi yang ditandai dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum maksimalnya pengelolaan destinasi berbasis *Community Based Tourism* (CBT). Padahal, konsep CBT menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok berbasis *Community Based Tourism* serta mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pengelola destinasi, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok telah menerapkan lima prinsip utama *Community Based Tourism*, yaitu prinsip ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Pada prinsip ekonomi, pengelolaan wisata mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pada prinsip sosial, masyarakat berpartisipasi aktif melalui kegiatan gotong royong, musyawarah, dan penguatan organisasi Pokdarwis. Pada prinsip budaya, masyarakat mampu mempertahankan keaslian adat dan budaya lokal sekaligus mengenalkannya kepada wisatawan. Pada prinsip lingkungan, masyarakat bersama Pokdarwis berkomitmen menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta memanfaatkan sebagian pendapatan wisata untuk pemeliharaan kawasan. Sementara itu, pada prinsip politik, masyarakat memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan, kepemilikan aset wisata, dan pengelolaan kelembagaan secara transparan. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, promosi digital, pengembangan fasilitas pendukung, serta perluasan keterlibatan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan destinasi menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Strategi Pengembangan, Community Based Tourism (CBT), Partisipasi Masyarakat, Destinasi Wisata, Tapian Tabiang Barasok.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: " Strategi Pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok Di Bukittinggi Berbasis *Community Based Tourism* ". Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana S1 Program Studi Pariwisata Syariah Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa kuliah sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag. Wakil Dekan 1 Ibu Era Sonita, SE., M.Si, Wakil Dekan 2 Bapak Ali Rahman, SH, MH, dan Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Imamuddin, M.Pd., M.E,yang telah memberikan fasilitas dan motivasi dalam ilmu dan pengetahuan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ketua Program Studi Pariwisata Syariah Ibuk Dewi Manda Anggraini, S.E M.B.A serta Sekretaris Program Studi Pariwisata Syariah yang telah membantu penulis memberikan fasilitas dan motivasi dalam ilmu pengetahuan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Ibu Ariyun Annisah, M.E selaku dosen penasehat akademik yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi sehingga bisa terselesaikan dengan tepat waktu.
5. Ibu Dewi Manda Anggraini, S.E M.B.A, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan

memberikan arahan-arahan bagi penulis sehingga bisa terselesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak dan Ibu dosen UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan dan membekali penulis ilmu pengetahuan selama 4 tahun ini.
7. Bapak Anton rumah panjang sebagai ketua pokdarwis beserta jajaran yang telah membantu penulis memberikan izinnya untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda tercinta Fuadisman dan Ibunda Dewi Susanti serta ke 2 saudara saudari tersayang saya Haykal zaky dan Khairunnisa yang dengan doa restu, petunjuk, nasehat, dan segala pengorbanannya tak akan penulis lupakan.
9. Untuk Dafa triandana, Izan fuad dan teman-teman seperjuangan yang selalu senantiasa memberikan arahan, dukungan, hiburan dan selalu berjuang bersama dalam penulisan skripsi ini.
10. Untuk wannur azizah terimakasih penulis ucapkan karna telah membantu lancarnya pembuatan skripsi dengan memberikan semangat dan juga arahan agar skripsi ini selesai tepat pada waktunya
11. Dan yang terakhir untuk Hafif Verdian apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan sampai di titik ini.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan pahala dan rahmat ALLAH SWT. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan

menyempurnakan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan pembaca mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Bukittinggi, Juli 2026

Hafif Verdian

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 6

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi masalah 7

C. Batasan Penelitian 7

D. Rumusan Masalah 7

E. Tujuan Masalah 7

F. Manfaat Penelitian 8

G. Penjelasan Judul 9

BAB II 10

LANDASAN TEORI 10

A. Kajian Teori 10

1. Community Based Tourism (CBT) 10

2. Pengembangan Destinasi Pariwisata 21

B. Kajian Terdahulu 28

BAB III 35

METODE PENELITIAN 35

A. Metode Penelitian 35

B. Jenis Penelitian 35

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 36

D. Jenis dan Sumber Data 36
1. Data primer 36
2. Data sekunder 36
E. Informan Penelitian 36
F. Teknik Pengumpulan Data 37
1. Observasi 37
2. Wawancara 37
3. Dokumentasi 38
G. Teknik Analisis Data 38
1. Reduksi data 38
2. Penyajian Data 39
BAB IV 40
HASIL DAN PEMBAHASAN 40
A. Deskripsi objek penelitian 40
1. Profil destinasi wisata Tapian Tabiang Barasok 40
f. Visi misi destinasi wisata Tapian Tabiang Barasok 41
B. Hasil Penelitian 41
1. Prinsip ekonomi 42
2. Prinsip sosial 44
3. Prinsip Budaya 47
4. Prinsip Lingkungan 49
5. Prinsip Politik 51
C. Pembahasan 54

1. Prinsip Ekonomi 54
2. Prinsip Sosial 56
3. Prinsip Budaya 59
4. Prinsip Lingkungan 62
5. Prinsip Politik 65

BAB V 68

PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

DOKUMENTASI 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan, mempunyai potensi untuk mengembangkan industri pariwisata sangat besar, karena industri pariwisata di Indonesia khususnya dan dunia umumya juga telah berkembang pesat. Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Sektor pariwisata menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Di Sumatera Barat, jumlah wisatawan mengalami peningkatan dari 6.041 menjadi 7.550 kunjungan pada akhir tahun 2024[1]. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

Kegiatan pariwisata terjadi bila ada daerah tujuan wisata dan wisatawan, yang membentuk suatu sistem. Bekerjanya sistem kepariwisataan yang utama terdiri dari sisi permintaan dan sisi penyediaan. Sisi permintaan merupakan masyarakat yang mempunyai keinginan untuk berwisata, orang yang melakukan perjalanan berwisata disebut wisatawan. Sisi penyediaan meliputi komponen transportasi, daya tarik wisata, pelayanan dan informasi atau promosi. Sisi penyediaan ini merupakan produk daerah tujuan wisata. [2]

Pengembangan pariwisata adalah segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua prasarana dan sarana, barang dan jasa fasilitas yang diperlukan, guna melayani wisatawan. Kegiatan dan pengembangan pariwisata mencakup segi-segi kehidupan dalam masyarakat, mulai dari kegiatan angkutan, akomodasi, atraksi wisata, makanan dan minuman, cinderamata, pelayanan, dan lainlain. Usaha ini untuk mendorong dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, sehingga memungkinkan perekonomian dalam negeri semakin maju dan berkembang.[3]

---

[1] Web Bps Kota Bukittinggi. Diakses April (2026).

[2] Warpani, Ahmad dan Indira Warpani. (2007). *Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah* Bandung: ITB.

[3] Oka, A. Yoeti. *(2002). Perencanaan Strategi Pemasaran Daerah Tujuan Wisata, Jakarta:PT.Pradya Paramita.*

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. [4] Kota Bukittinggi, yang terletak di Sumatera Barat, telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan dengan keindahan alam, kekayaan budaya, dan sejarah yang menarik diantaranya Wisata Jam Gadang, Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan Bukittinggi, Panorama Baru, Lobang Jepang, Puncak Taruko, Museum Bung Hatta, Benteng Fort de Kock, Ngarai Sianok dan sebagainya. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul tantangan bagi pengelolaan destinasi wisata untuk terus berinovasi dan mengembangkan destinasi baru yang dapat menarik lebih banyak wisatawan.

Beragam potensi wisata menarik untuk dikunjungi salah satu diantaranya adalah Wisata Tapian Tabiang Barasok yang berlokasi di Jalan Lapau Batu, Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi. Tapian Tabing Barasok menawarkan pemandangan alam yang memukau, dari ketinggian taman ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan luas yang meliputi bukit-bukit hijau, lembah yang indah, dan kota yang terhampar di kejauhan. Matahari terbenam di sini juga menjadi momen yang sangat dinantikan, memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi para pengunjung. Selain pemandangan alam yang menakjubkan, Tapian Tabiang Barasok juga menawarkan sejumlah spot foto Instagramable yang siap memukau pengunjung. Dari titik-titik tertentu di taman ini, pengunjung dapat mengabadikan momen indah dengan latar belakang pemandangan yang menakjubkan. Pengunjung dapat mengabadikan berbagai momen indah dari titik-titik tertentu yang tersedia di kawasan taman ini, yang menawarkan latar belakang pemandangan alam yang menarik dan estetis. Dengan membayar tiket masuk sebesar Rp10.000, pengunjung tidak hanya memperoleh akses ke area taman, tetapi juga mendapatkan fasilitas tambahan berupa air mineral.

Namun demikian, keberhasilan suatu destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh keunggulan fisik dan daya tarik visual semata, melainkan juga bagaimana destinasi tersebut dikelola secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan destinasi wisata tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan pelibatan masyarakat setempat sebagai komponen utama dalam pariwisata berbasis komunitas atau *Community Based Tourism* (CBT).

---

[4] Hasana Fadila. (2024). Pengembangan Sektor Pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Di Indonesia. *Journal Of Business, Economics, And Finance*. Volume 2 Issue 1.

Community Based Tourism (CBT) menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata sehingga manfaat yang diperoleh dari sektor pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. [5] Model pengembangan ini juga memastikan keberlanjutan destinasi melalui pengelolaan yang ramah lingkungan dan sosial, yang berfokus pada pelestarian budaya dan alam.[6]

Pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism (CBT) merupakan salah satu konsep pengelolaan kepariwisataan yang mengutamakan keikutsertaan masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan hidup masyarakat sembari memperhatikan kehidupan sosial, lingkungan serta budaya masyarakat yang bersangkutan. Pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism merupakan jenis atraksi wisata yang mengedepankan pendekatan perkembangan pariwisata yang berasal dari inisiatif masyarakat yang mana penerapan pariwisata berbasis masyarakat ini dianggap mampu untuk meningkatkan taraf hidup serta memberikan perlindungan terhadap kehidupan sosial, budaya serta tradisi masyarakat yang ada di suatu daerah tujuan wisata.[7]

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan destinasi wisata berbasis *Community Based Tourism* (CBT) adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi. Meskipun konsep CBT menempatkan masyarakat sebagai yang berperan dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi, kenyataannya banyak masyarakat lokal yang belum terlibat secara aktif. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya peran mereka dalam pengembangan pariwisata.[8]

Perencanaan destinasi pariwisata adalah proses strategis untuk mengembangkan, mengelola, dan mempromosikan suatu destinasi agar menarik wisatawan dan memenuhi kebutuhan pasar sambil mempertahankan kelestarian lingkungan dan budaya. Proses perencanaan destinasi juga melibatkan identifikasi daya tarik yang ada, pengembangan infrastruktur yang sesuai, dan analisis potesial. Perencanaan destinasi yang baik harus didasarkan pada analisis preferensi pasar. Analisis ini

---

[5] Diana dan Setiawan. (2021). Community-Based Tourism sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal di kawasan wisata pesisir. *Jurnal Pariwisata Indonesia*. 16(1), 45–58.

[6] Demartoto, A. (2009). Community Based Tourism Development.

[7] Baskoro, BRA dan Rukendi, Cecep. (2008). Membangun Kota Pariwisata Berbasis Kominitas: Suatu Kajian Teoritis. J kepariwisataan.

[8] Putra, I. N. D., & Pitana, I. G. (2021). *Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Denpasar: Udayana University Press.

melibatkan riset pasar untuk memahami segmen wisatawan yang akan datang, baik lokal maupun internasional, dan bagaimana mereka memilih destinasi berdasarkan hal-hal seperti harga, aksesibilitas, dan jenis aktivitas yang tersedia. [9]

Pengelolaan destinasi pariwisata merupakan inti dari keberlanjutan industri pariwisata. Keberlanjutan industri pariwisata akan sangat bergantung pada bagaimana stakeholder mengelola destinasi pariwisata agar destinasi kompetitif dan mampu menjangkau kebutuhan wisatawan baik dari aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitis.[10]

Berdasarkan hasil observasi melalui wawancara dengan ketua pengurus di Wisata Tapian Tabiang Barasok, dapat dinyatakan bahwa penerapan *Community Based Tourism* (CBT) pada Wisata Tapian Tabiang Barasok**,** telah mulai diimplementasikan melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berperan dalam pengelolaan destinasi. Upaya pelestarian lingkungan dilakukan melalui kegiatan gotong royong pembersihan kawasan wisata. Meskipun demikian, tingkat keterlibatan masyarakat masih belum merata, karena hanya sebagian kecil yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemasaran pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi CBT di Tapian Tabiang Barasok masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Sehingga manfaat ekonomi atau sosial dapat dirasakan secara lebih oleh masyarakat setempat.

Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat rendahnya partisipasi ini. Masyarakat lokal sering kali tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai dalam hal pengelolaan pariwisata, pemasaran, pelayanan. ataupun pelestarian budaya dan lingkungan. Manusia bertanggung jawab menjaga kelestarian alam dan memanfaatkan sumber daya secara adil sesuai dengan ayat berikut.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

[9] Andi Fatimah Maoudy. A dkk, (2025). *Perencanaan Destinasi Pariwisata.* Yogyakarta: Pt Star Digital Publishing.

[10] Fauziyah Eddyono. (2021). *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia.

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui."

Masyarakat lokal masih memiliki akses yang terbatas terhadap program pelatihan, pendampingan, dan pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata. Program pelatihan yang ada belum dilakukan secara berkelanjutan dan merata, sehingga tidak semua masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai potensi pariwisata, manfaat ekonomi, serta prinsip keberlanjutan masih relatif rendah. Kurangnya pelatihan sumber daya manusia (SDM) di Wisata Tapian Tabiang Barasok menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan destinasi secara profesional. SDM yang terlibat di lapangan masih minim pengetahuan dan keterampilan di bidang pelayanan wisatawan, manajemen destinasi, maupun promosi pariwisata, sehingga kualitas pelayanan dan pengelolaan destinasi belum sepenuhnya maksimal. Kondisi ini juga berdampak pada lemahnya sistem informasi dan pemasaran yang dapat dijalankan secara mandiri oleh masyarakat sekitar.

Selain itu, pemasaran destinasi Tapian Tabiang Barasok masih sangat bergantung pada kunjungan mahasiswa yang datang secara terbatas dan bersifat sementara, misalnya dalam rangka kegiatan praktik lapangan, penelitian, atau pengabdian masyarakat. Ketergantungan pada segmen ini membuat promosi destinasi kurang merata dan tidak berkelanjutan, karena intensitas kunjungan mahasiswa cenderung hanya muncul pada periode tertentu saja dan tidak dapat diandalkan sebagai sumber kunjungan utama.

Akibatnya, potensi wisata Tapian Tabiang Barasok yang sebenarnya memiliki daya tarik alam dan estetika yang cukup kuat belum mampu menarik minat wisatawan lebih luas, terutama wisatawan umum dan wisatawan luar daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa destinasi belum didukung oleh strategi pemasaran yang terencana, inovatif, dan berbasis komunitas, sekaligus belum memiliki SDM lokal yang cukup terlatih untuk mengelola dan mempromosikan destinasi secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu salah satu masalah struktural utama di Wisata Tapian Tabiang Barasok adalah pemindahan pintu masuk yang tidak terencana dan kurang melibatkan masyarakat, menyebabkan aksesibilitas menurun drastis. Awalnya, pintu masuk berada di lokasi

strategis Jalan Lapau Batu yang mudah dijangkau dari pusat kota Bukittinggi (sekitar 1-2 km dari Jam Gadang), dengan visibilitas tinggi bagi kendaraan dan pejalan kaki, memudahkan wisatawan lokal maupun rombongan, Pemindahan ini dilakukan sekitar pertengahan 2025. Berdasarkan data pengunjung yang telah didapatkan dari pengelola Wisata Tapian Tabiak Barasok dari bulan November 2025 sampai dengan Maret 2026 yaitu :

Tabel 1.1
Data jumlah pengunjung Wisata Tapian Tabiak Barasok dari November 2025 - April 2026

No.	Nama Bulan	Jumlah Pengunjung
1.	November	573
2.	Desember	643
3.	Januari	551
4.	Februari	513
5.	Maret	687
	Total	2.967

Sumber : Pokdarwis Tapian Tabiang Barasok Tahun Perolehan Data

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa jumlah pengunjung secara keseluruhan relatif rendah dengan total 2,967 orang. Hal itu menunjukkan adanya faktor-faktor struktural yang kurang menarik minat beli wisatawan, seperti aksesibilitas terbatas, minimnya fasilitas CBT (homestay, toilet, signage), dan promosi yang belum optimal di platform digital. Adapun jumlah pengunjung paling sedikit yaitu pada bulan Februari berjumlah 513 orang, sedangkan jumlah pengunjung paling banyak yaitu pada bulan Maret sebanyak 687 orang.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok masih tergolong rendah dan belum merata. Keterlibatan masyarakat cenderung didominasi oleh kelompok tertentu, seperti anggota Pokdarwis. partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam *Community Based Tourism* (CBT) yang mencakup keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **Strategi Pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok Di Bukittinggi Berbasis *Community Based Tourism*.**

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka identifikasi masalahnya yaitu:

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pengelolaan pariwisata, pelayanan, dan pemasaran.
2. Keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat mengenai pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok
3. Tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok masih belum optimal dan belum merata, sehingga peran masyarakat sebagai subjek utama dalam konsep Community Based Tourism (CBT) belum sepenuhnya terwujud.

C. Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka batasan penelitian ini yaitu Strategi Pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok Di Bukittinggi Berbasis *Community Based Tourism*. khususnya pada aspek partisipasi masyarakat, pengelolaan destinasi, penelitian ini berfokus pada wilayah Wisata Tapian Tabiang Barasok dan tidak membahas objek wisata yang lain. Penelitisn ini menggunakan konsep pendekatan *Community Based Tourism*

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok Di Bukittinggi dengan pendekatan *Community Based Tourism*?

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian

dapat ditulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok di Bukittinggi

2. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok Di Bukittinggi dengan pendekatan *Community Based Tourism.*

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   a. Bagi peneliti, penelitian ini untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Program Studi Pariwisata Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi

   b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Strategi pengembangan Wisata Tapian Tabiang
   Barasok berbasis *Community Based Tourism*

   c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini untuk referensi atau pedoman terkait pengembangan destinasi berbasis *Community Based Tourism.*
   d. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pariwisata mengenai pengembangan destinasi berbasis *Community Based Tourism.*

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Masyarakat lokal, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan destinasi akan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, pelayanan wisatawan, dan pelestarian budaya serta lingkungan.
   b. Bagi Pokdarwis, penelitian ini dengan adanyan pendekatan CBT, Pokdarwis akan memiliki peran yang lebih besar dalam

pengelolaan destinasi dan dapat meningkatkan kapasitas organisasi melalui kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat lokal.

c. Bagi Pemerintah Daerah, dengan penelitian ini pemerintah dapat merencanakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata dan kebutuhan masyarakat lokal secara sinergis, sehingga pembangunan lebih tepat guna.

G. Penjelasan Judul

Judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait Strategi Pengembangan Destinasi Panorama Baru Di Bukittinggi Berbasis *Community Based Tourism* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Strategi	: Rencana atau pendekatan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu dalam suatu konteks. Konsep strategi mencakup serangkaian tindakan yang terencana dan sistematis untuk mengatasi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mencapai hasil yang diinginkan.
Pengembangan	: proses perencanaan, pengelolaan, dan peningkatan suatu lokasi wisata untuk meningkatkan daya tariknya bagi pengunjung, sekaligus memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat lokal.
CBT	: Salah satu konsep pengelolaan kepariwisataan yang mengutamakan keikutsertaan masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan hidup masyarakat sembari memperhatikan kehidupan sosial, lingkungan serta budaya masyarakat yang bersangkutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Community Based Tourism (CBT)

Pariwisata berbasis masyarakat sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development paradigma)* pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global.

Pariwisata yang berbasis masyarakat merupakan suatu wujud aktif atau pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan, terutama masyarakat sekitar tempat wisata. Menurut Suansri CBT sebagai konsep yang memperhitungkan aspek berkelanjutan lingakungan, sosial, dan budaya. CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.[11]

Community Based Tourism (CBT) adalah konsep yang menekankan kepada pemberdayaan komunitas untuk menjadi lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka milliki, seperti kebudayaan, adat istiadat, masakan kuliner, gaya hidup. Dalam konteks pembangunan wisata, komunitas tersebut menjadi daya tarik utama bagi pengalaman berwisata. [12]

Community Based Tourism (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan dan menempatkan keberlanjutan lingkungan sosial dan budaya, diatur dan dimiliki oleh komunitas, untuk komunitas. Kemudian Suansri menguatkan definisi Community Based Tourism (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan sosial dan budaya dalam komunitas. CBT

---

[11] Sunaryo, (2019). Perkembangan wisata belanja "oleh-oleh makanan" Di Kota Malang. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA), 6(1), 25-47.

[12] Baskoro, BRA dan Cecep Rukendi. (2008). Membangun Kota Pariwisata Berbasis Komunitas: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia.* Volume 3, No.1.

merupakan alat bagi pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan.[13]

Dari pengertian *Community Based Tourism* di atas dapat disimpulkan bahwa *Community Based Tourism* adalah **s**ebuah konsep pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya wisata, dengan berlandaskan pada prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya**.** CBT tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat untuk mengenali, melestarikan, dan memanfaatkan aset lokal seperti budaya, adat, kuliner, maupun gaya hidup sebagai daya tarik wisata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan secara berkelanjutan.

Community Based Tourism (CBT) suatu konsep yang menekankan kepada pemberdayaan komunitas untuk menjadi lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka milliki, seperti kebudayaan, adat istiadat, masakan kuliner, gaya hidup. Dalam konteks pembangunan wisata, komunitas tersebut menjadi daya tarik utama bagi pengalaman berwisata. Pemberdayaan dan pembangunan masyarakat sangat ditekankan dalam konsep CBT yang juga merupakan pilar pertma agar masyarakat mampu mandiri dalam mengelola potensi pariwisata diwilayahnya secara bersama-sama. Konsep CBT juga mengacu pada kearifan lokal setiap wilayah yang memang sudah menjadi budaya wilayah itu sendiri[14]

Community based tourism sebagai pariwisata yang memperhitungkan dan menempatkan keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya, diatur dan dimiliki oleh komunitas, untuk komunitas. Teori ini melihat *community based tourism* bukan dari aspek ekonomi terlebih dahulu melainkan aspek pengembangan kapasitas komunitas dan lingkungan, sementara aspek ekonomi menjadi *induced impact* dari aspek sosial, budaya dan lingkungan.

Secara umum peran masyarakat lebih menitikberatkan kepada partisipasi. Tinggi rendahnya partisipasi yang diberikan akan

---

[13] Nurwanto. Evaluasi Dampak Pembangunan Pariwisata Menggunakan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Kawasan Wisata Tebing Breksi. (2020). *Juranal Kepariwisataan Indonesia.* Vol 14. No 2.

[14] Sunaryo, (2019). Perkembangan wisata belanja "oleh-oleh makanan" Di Kota Malang. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA), 6(1), 25-47.

berdasarkan pada tingkat keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat dan kemampuan pemahaman pada setiap level dalam proses kebijakan public. Pada dasarnya tidak semua masyarakat sudah mampu memberikan saran, kritik, ide dan sebagainya. Peran lain dapat digali adalah partisipasi dibidang pendanaan. Pengerahan dana masyarakat sering kali dilakukan sebagai perbandingan kemampuan masyarakat terhadap pendanaan dalam satu kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, sumber pendanaan yang dihimpun masyarakat lebih populer disebut dengan swadaya masyarakat. Peran masyarakat yang lain adalah memiliki fungsi pada kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.[15]

Pada hakikatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri. Kepariwisataan harus dipandang sebagai kegiatan yang berbasis komunitas. Batasan pengertian berbasis masyarakat sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatakelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajement dan pembangunan kepariwisataan yang ada.
2. Wujud tatakelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha-usaha kepariwisataan juga bias mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada.
3. Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematik dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang ada pada destinasi wisata. [16]

Secara prinsipal, *community based tourism* berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. Oleh karena itu pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat, seperti berikut ini :

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan

---

[15] Sastrayuda, Gumelar. Konsep Pengembangan kawasan Ekowisata. Yogyakarta. 2010

[16] Boy Suprayogi. (2020). Community Based Tourism (CBT) Sebagai Konsep Pengembangan Pariwisata Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Riau.

2. Adanya kepastian masayarkat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.

3. Menjamin sustanbilitas lingkungan.

4. Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik. [17]

Community Based Tourism tidak berada pada tataran bagaimana pariwisata dapat memberikan manfaat yang lebih tinggi bagi komunitas, tetapi lebih bagaimana pariwisata dapat memberikan manfaat yang lebih tinggi bagi komunitas, tetapi lebih pada bagaimana pariwisata berkontribusi pada proses pembangunan masyarakat. CBT lebih memfokuskan pada dampak yang ditimbulkan pariwisata terhadap masyarakat (komunitas) dan sumber daya lingkungan, dalam hal ini wisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan organisasi masyarakat dalam mengatur sumber daya yang ada melalui partisipasi masyarakat langsung. [18] Salah satu konsep yang menjelaskan peranan komunitas dalam pembangunan pariwisata adalah community based tourism, yaitu konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat turut andil dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemberian suara berupa keputusan dalam pembangunannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berwujud partisipasi dapat dilihat dalam lima tahap sebagai berikut:[19]

a. Tahap Persiapan

   Partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah dengan mengikuti sosialisasi yang diadakan untuk menyongsong kehadiran pengembangan Kampung Wisata Tani sebagai desa wisata

b. Tahap Perencanaan

   Tahap ini terdiri atas identifikasi kebutuhan dan analisis kemampuan. Pada tahap ini partisipasi masyarakat bersifat

---

[17] Sunaryo, (2019). Perkembangan wisata belanja "oleh-oleh makanan" Di Kota Malang. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA).

[18] Tresiana dan Duadji. (2018). A participation model based on community foru as a resproductive health knowledge transaction space to increase male participation in vasectomy. Masyarakat, kebudayaan dan politik, Vol 31, No.1 (2018) 31 (1), 1-13, 2018.

[19] Rohim. (2013). Peberdayaan Masayarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY) (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Kalijagga).

fungsional, artinya masyarakat setempat berpartisipasi terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh tenaga ahli yang berasal dari luar desa setempat yang diberi kepercayaan dalam pengembangan Kampung Wisata Tani sebagai desa wisata.

c. Tahap Operasional

Tahap ini terdiri atas partisipasi berbentuk fisik pdan partisipasi berbentuk nonfisik. Pada partisipasi berbentuk fisik (*physical participation*), partisipasi masyarakat setempat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, mobilitas sendiri, artinya masyarakat dengan penuh kesadaran membangun fasilitas fisik untuk menunjang pengembangan pariwisata di desanya.

d. Tahap pengembangan

Pada tahap ini partisipasi masyarakat bersifat spontan, antara lain dengan mendirikan dan mengelola usaha-usaha yang terkait dengan kepariwisataan, seperti pengelolaan usaha 40 penginapan, usaha warung makan dan minuman, serta usaha yang menjual kebutuhan sehari-hari.

e. Tahap Pengawasan

Pada tahap ini, partisipasi masyarakat lebih kepada pengawasan yang bersifat praktis dan preventif.

Keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat akan mampu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan membawa dampak positif bagi upaya pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan dapat menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari masyarakat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan pariwisata. Hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal pariwisata berbasis masyarakat adalah wisatawan nusantara karena potensinya yang sangat besar dalam menumbuhkan dan mengembangkan destinasi pariwisata.[20]

Batas pemahaman pariwisata mengacu pada komunitas atau pariwisata berbasis masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi:

[20] Prasiasa. (2013). *Destinasi Pariwisata Berbasis Masayarakat*. Jakarta: Salemba Humanik.

1. Bentuk pengelolaan pariwisata yang berpeluang bagi masyarakat sekitar tempat wisata untuk melakukan system Controlling dalam keterlibatannya dalam hal pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang ada.

2. Bentuk manajemen pariwisata yang dapat memberikan peluang bagi orang-orang yang terlibat langsung dalam bisnis pariwisata juga dapat memperoleh manfaat dari pariwisata yang ada.
3. Bentuk-bentuk pariwisata yang mengacu pada pemberdayaan terstruktur secaara terbuka yang memberikan manfaat positif dalam hal pengelolaan wisata.[21]

   Terdapat Sembilan karakteristik kepariwisataan berbasis masyarakat yakni :

1. Berskala kecil

2. Dimiliki oleh anggota atau kelompok masyarakat setempat sehingga memberi manfaat pada masyarakat setempat
3. Memberikan kesempatan kerja dan peluang ekonomi pada ekonomi setempat
4. Lokasinya tersebar tidak terkonsentrasi di suatu tempat
5. Desain dan kegiatan mencerminkan karakter wilayah setempat

6. Mengedepankan kelestarian wawasan budaya

7. Tidak mematikan industry dan kegiatan lainnya saling melengkapi
8. Menawarkan pengalaman yang berkualitas bagi wisatawan

9. Merupakan kegiatan usaha yang menguntungkan. [22]

Kebijakan lebih lanjut dari pembangunan pariwisata berbasis masyarakat di destinasi pariwisata adalah jajaran pemerintah dan swasta menjamin bahwa manfaat pengembangan destinasi wisata itu dapat dinikmati oleh masyarakat local, mereka akan memberikan dukungan dan

---

[21] Sunaryo, Bambang. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media

[22] Paturusi, Syamsul Alam. (2008). *Perencanaan Kawasan Pariwisata*, Denpasar: Udayana University Press.

partisipasinya termasuk dalam pelestarian dan assetaset alam dan budaya yang terdapat pada destinasi wisata.

Community based tourism dikembangkan berdasarkan pada prinsip keseimbangan Antara berbagai pihak lain yang terlibat dalam pembangunan pariwisata termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Secara konsep, prinsip pembangunan pariwisata berbasis masyarakat ini lebih menekankan pada pembangunan pariwisata dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dalam setiap tahapan pembangunan yang dinilai dari kegiatan perencanaan, pengelolaan, serta monitoring dan evaluasi, masyarakat wajib dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk berperan didalamnya. Karena tujuan akhir dari CBT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[23] Adapun lima prinsip dasar CBT yakni:

a. Prinsip ekonomi

Prinsip ekonomi dalam CBT menekankan bahwa pengelolaan dan kepemilikan usaha pariwisata harus sepenuhnya berada di tangan komunitas lokal, bukan didominasi oleh investor eksternal. Tujuannya adalah agar keuntungan dari aktivitas wisata seperti homestay, kerajinan tangan, atau tur lokal dapat dibagikan secara adil melalui mekanisme seperti dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan terkait atau sistem bagi hasil yang transparan. Selain itu, prinsip ini mendorong penciptaan lapangan kerja yang merata, termasuk bagi kelompok rentan seperti pemuda, perempuan, dan lansia, sehingga pariwisata menjadi alat pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang mengurangi kemiskinan dan ketergantungan pada sektor lain.

Indikator	Penjelasan / Cara Mengukur
Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga	Mengukur selisih pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah terlibat dalam aktivitas CBT (misalnya dari penyewaan *homestay*, pemandu, atau kuliner).[24]

[23] Suwarjo. (2019). *Penerapan Community Based Tourism dalam pengelolaan desa wisata Giriloyo*, Wukirsari, Imogiri, Bantul. Populika, 7(1).

[24] Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. REST Project.

Peluang Kerja Lokal (*Local Employment*)	Persentase tenaga kerja lokal yang terserap dalam operasional pariwisata dibanding tenaga kerja dari luar daerah (target ideal CBT adalah >90% lokal).[25]
Transparansi Alokasi Dana Komunitas	Adanya persentase keuntungan bersih yang disisihkan secara konsisten (misal 10-20%) untuk kas bersama/desa guna pembangunan fasilitas publik.[26]

b. Prinsip sosial

Pada aspek sosial, CBT bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan melalui partisipasi aktif semua anggota komunitas. Pembagian peran harus adil antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi gender, serta memastikan akses yang setara untuk berbagai kelompok usia dan latar belakang. Mekanisme seperti musyawarah desa, pelatihan keterampilan, dan forum diskusi digunakan untuk membangun rasa memiliki, mengurangi konflik internal, dan memperkuat kohesi sosial, sehingga pariwisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan tapi juga perekat komunitas, meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil, Antara laki-laki, perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas.

Indikator	**Penjelasan / Cara Mengukur**
Peningkatan Kualitas Hidup (*Quality of Life*)	**(*Quality of Life*)**Persepsi masyarakat terhadap perbaikan akses infrastruktur desa (jalan, air bersih, sinyal) yang dipicu oleh adanya pembangunan pariwisata.[27]
Rasa Bangga Komunitas (*Community*	Tingkat kebanggaan warga lokal terhadap daerahnya saat menerima kunjungan wisatawan

[25] Asker, S., Boronyak, L., Carrard, N., & Paddon, M. (2010). *Effective Community Based Tourism: A Best Practice Manual*. Sustainable Tourism CRC.

[26] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Pedoman Jejaring Desa Wisata (Jadesta)*. Kemenparekraf RI.

[27] Tosun, C. (2001). *Challenges of sustainable tourism development in the developing world: the case of Turkey*. Tourism Management, 22(3), 289-303.

Pride)	mancanegara/domestik (diukur dengan skala Likert melalui kuesioner).[28]
Keseimbangan Gender dan Pemuda	Rasio keterlibatan perempuan dan pemuda dalam posisi strategis manajemen (bukan hanya sebagai pekerja kasar/pelayan).[29]

c. Prinsip budaya

Prinsip budaya menuntut penghormatan mendalam terhadap keragaman dan kekayaan budaya lokal, termasuk adat istiadat, seni tradisional, dan nilai-nilai spiritual. Komunitas didorong untuk berbagi budaya melalui pertukaran autentik dengan wisatawan, seperti festival adat atau demonstrasi kerajinan, sambil melindungi tradisi dari komersialisasi berlebih atau apropriasi budaya. Pendekatan ini memastikan bahwa pariwisata memperkaya identitas lokal daripada merusaknya, dengan edukasi wisatawan tentang etika kunjungan untuk menjaga keaslian dan kebanggaan komunitas.

Indikator	Penjelasan / Cara Mengukur
Revitalisasi Tradisi & Seni Lokal	Frekuensi atau jumlah kegiatan adat, kerajinan tradisional, atau seni pertunjukan yang dihidupkan kembali karena adanya permintaan pariwisata.[30]
Keaslian Budaya (*Authenticity*)	Kemampuan masyarakat mempertahankan esensi ritual/budaya asli tanpa melakukan komandifikasi berlebihan (modifikasi ekstrem demi uang).[31]
Sistem Edukasi Wisatawan	Ketersediaan *code of conduct* (aturan berperilaku) tertulis atau panduan lisan dari *tour guide* lokal

[28] Besculides, A., Lee, M. E., & McCormick, P. J. (2002). *Residents' perceptions of the cultural benefits of tourism*. Annals of Tourism Research, 29(2), 303-319.

[29] Scheyvens, R. (2002). *Tourism for Development: Empowering Communities*. Pearson Education.

[30] Cole, S. (2006). *Information and empowerment: The keys to achieving sustainable tourism*. Journal of Sustainable Tourism, 14(6), 629-644.

[31] Tosun, C. (2001). *Challenges of sustainable tourism development in the developing world: the case of Turkey*. Tourism Management, 22(3), 289-303.

	mengenai norma dan adat yang harus dihormati wisatawan.[32]

d. Prinsip lingkungan

Fokus lingkungan pada CBT adalah menjaga keberlanjutan ekologi agar destinasi tetap menarik untuk generasi mendatang. Ini mencakup pengelolaan carrying capacity (kapasitas daya dukung) agar jumlah wisatawan tidak melebihi batas alam, penerapan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan seperti pengomposan atau daur ulang, serta konservasi sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan satwa liar. Komunitas dilatih untuk memantau dampak lingkungan, sehingga pariwisata menjadi alat pelestarian alam, bukan penyebab degradasi.

Indikator	Penjelasan / Cara Mengukur
Penerapan *Carrying Capacity* (Daya Dukung)	Adanya batasan kuota jumlah pengunjung harian di area sensitif (seperti hutan, gua, atau air terjun) untuk mencegah kerusakan ekosistem.[33]
Sistem Pengelolaan Limbah Wisata	Tersedianya fasilitas pemilahan sampah, pengelolaan limbah cair dari *homestay*, serta program rutin bersih desa yang melibatkan warga dan wisatawan.[34]
Kontribusi Dana untuk Konservasi	Adanya sebagian keuntungan tiket atau paket wisata yang dialokasikan khusus untuk penanaman pohon, perlindungan satwa, atau pelestarian alam lokal.[35]

[32] Asker, S., Boronyak, L., Carrard, N., & Paddon, M. (2010). *Effective Community Based Tourism: A Best Practice Manual*. Sustainable Tourism CRC.

[33] UNWTO (World Tourism Organization). (2004). *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook*. UNWTO.

[34] Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. REST Project.

[35] Denman, R. (2001). *Guidelines for Community-based Ecotourism Development*. WWF International.

e. Prinsip politik

Meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kepuasan komunitas yang lebih luas, menjamin hakhak dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. *Community based tourism* suatu model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, insiatif dan peluang masyarakat lokal. [36]

Indikator	**Penjelasan / Cara Mengukur**
Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan	Persentase kehadiran dan keaktifan warga dalam forum musyawarah/rembuk desa untuk menentukan zonasi wisata atau aturan tarif.[37]
Kepemilikan Lokal (*Local Ownership*)	Dominasi kepemilikan aset wisata (lahan, penginapan, atraksi) oleh warga lokal atau kolektif (Pokdarwis/BUMDes) dibanding investor asing/luar.[38]
Legitimasi Lembaga Pengelola	Adanya AD/ART, struktur organisasi yang jelas, dan laporan pertanggungjawaban keuangan berkala yang dilaporkan transparan kepada seluruh warga.[39]

[36] Khairunnisa Khalda Syafiqah. (2020). Implementasi Konsep Community Based Tourism (CBT) Dalam Mendukung Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan pada Destinasi Wisata Sanghyang Kenit di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pencinta Alam dan Lingkungan*, Vol. 1, No.2.

[37] Tosun, C. (2001). *Challenges of sustainable tourism development in the developing world: the case of Turkey*. Tourism Management, 22(3), 289-303.

[38] Scheyvens, R. (2002). *Tourism for Development: Empowering Communities*. Pearson Education.

[39] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Pedoman Jejaring Desa Wisata (Jadesta)*. Kemenparekraf RI.

2. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sebagian atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu yang sementara.[40]

Wisata merupakan sebuah perjalanan atau kunjungan yang dilakukan baik individu maupun sekelompok ke tempat yang merupakan penting dalam penyebaran dakwah dan pendidikan Islam.[41]

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengn mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunukan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara, dan suatu tempat yang menjadi pusat daya tarik dan dapat memberikan kepuasan pengunjung.[42]

Berdasarkan pengertian wisata di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok di suatu tempat yang memiliki daya tarik sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung di wisata tersebut dengan waktu sementara.

Destinasi wisata dapat digolongkan berdasarkan ciri-ciri destinasi tersebut sebagai berikut:

---

[40] I Ketut Suwena dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), hal. 21.

[41] Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*,(Yogyakarta: Gava Media, 2013). hal 32

[42] Isdarmanto dkk, *Dasar-Dasar Kepariwisataan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2017), hal 19.

a. Destinasi sumber daya alam, seperti iklom, pantai, hutan, pulau.

b. Destinasi sumber daya budaya, seperti tempat bersejarah, museum,teater, dan masyarakat local.
c. Fasilitas rekreasi, seperti taman hiburan.

d. Aktivitas spesifik, seperti petualang.

Dalam pengembangan destinasi pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pengembangan harus menggabungkan beberapa aspek pengunjung kebijakan kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah pengembangan fasilitas, pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan aktivitas pemasaran, kualitas lingkungan hidup, aksesbilitas dan transportasi. Perkembangan suatu destinasi pariwisata harus memehuhi kreteria agar obyek destinasi wisata tersebut dapat diminati pengunjung, yaitu:[43]

a. *Something to see*

Destinasi wisata yang harus memiliki sesuatu yang bisa dilihat atau mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung didestinasi wisata tersebut.

b. *Something to do*

Wisatawan dapat melakukan pariwisata disana bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, relax yang berupa fasilitas-fasilitas rekreasi baik itu arena beraktivitas bermain atau tersedianya berbagai tempat makan, terutama makanan khas lokal dari tempat tersebut sehingga mampu memberikan pengalaman baru.

c. *Something to buy*

Fasilitas untuk wisatawan dapat beberlanja yang berupa souvenir, cendra mata untuk dijadikan suatu oleh-oleh.

Menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang

[43] Isdarmanto,. *Dasar-Dasar Kepariwisataan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. (Gerbang Media Aksara: Yogyakarta. 2018). Hlm.59.

kepariwisataan, daerah tujuan wisata atau destinasi pariwisata suatu kawasan geografis yang spesifik yang didalamnya terdapat kegiatan kepariwisataan dan dilengkapi dengan ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, aksesbilitas serta masyarakat yang saling terkait.
Komponen-komponen utama dari pengembangan pariwisata yaitu:

a. Objek dan daya tarik (atraksi) baik pada budaya, alam maupun buatan.
b. Aksesibilitas, sarana dan prasarana yang mendukung pergerakan wisatawan.
c. Amenitas, fasilitas pendukung dan penunjang wisata yang meliputi: rumah makan, akomodasi, cendera mata, pusat informasi, agen perjalanan dan lain-lain.
d. Kelembagaan, suatu integritas antara pemerintah, organosasi, pelaku pariwisata untuk menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

Jenis wisata dibagi menjadi bebrapa jenis yaitu:

a. Wisata Kuliner

Wisata ini tidak semata-mata untuk mengenyangkan dan memanjakan perut dengan aneka ragam masakan dari khas daerah tujuan wisata, tetapi juga mendapatkan pengalaman yang menarik juga menjadi motivasinya.

b. Wisata Olahraga

Wisata ini memadukan kegiatan olahraga dengan kegiatan wisata, seperti panjat tebing, pendakian gunung dan lainya.

c. Wisata Komersial

Wisatawan yang melakukan perjalanan untuk mengunjungi pemeran-pameran dan pecan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri.

d. Wisata Bahari

Perjalanan yang banyak dikaitkan dengan olahraga air seperti danau, pantai, air laut dan lainya.

e. Wisata Cagar Alam

Wisata yang banyak diselenggarakan oleh biro perjalanan yang memngkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat cagar alam, taman lindung, pegunungan dan lain sebagainya.

f. Wisata Edukasi

Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kreaktivitas.

g. Wisata Budaya

Perjalanan yang bertujuan untuk mengetahui tentang adat istiadat, keunikan daerah, budaya dan sejarah suatu tempat.

h. Wisata Pertanian (Wisata Agrowisata)

Wisata pertanian suatu pengorganisasian perjalanan yang dilakukan di pertanian, perkebunan, pembibitan dimana, wisatawan dapat mengadakan kunjungan dengan tujuan tertentu.

a. Wisata Religi

Salah satu jenis produk wisata yang berkaitan erat dengan sisi religious atau keagamaan yang dianut oleh umat manusia.[44]

b. Wisata Halal

Salah satu bentuk wisata yang berbasis budaya dengan mengutamakan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai pondasi utama. Siklus industri pariwisata yang masih dalam fase pengembangan, tentunya membutuhkan gagasan yang lebih mutahir dan internalisasi pemahaman secara menyeluruh terhadap integrasi nilai-nilai Islam pada seluruh tahapan kegitan pariwisata.[45][46]

3. Pariwisata Syariah

Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilainilai keislaman kedalam seluruh kegiatan wisata. Pokok dari wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna syariah disegala aspek kegiatan wisata mulai dari sarana penginapan, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri.

---

[44] Muljadi, *Kepariwisatan dan Perjalanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hal 32.

[45] Fadhil Surur, *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi*, (Makasar: Alauddin University Press,

[46]), hal, 28

Pariwisata syariah adalah kegiatan perjalanan muslim ketika bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau ketika berada di satu tempat di luar tempat tinggal mereka yang normal untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan untuk terlibat dalam kegiatan dengan motivasi Islam. Perlu dicatat, kegiatan wisata dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku umum, yaitu halal.

Pariwisata syariah yaitu perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip nilai syariah Islam. Baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya tidak meninggalkan ibadah dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum yang halalan thayyiban, hingga kepulangannya pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah.

Pariwisata syariah mulai diperkenalkan sejak tahun 2000 dari pembahasan pertemuan OKI (Organisasi Konferensi Islam). Pariwisata syariah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkah dari Allah SWT.

Kriteria umum pariwisata syariah ialah memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan, menghindari kemusyrikan dan khurafat, bebas dari maksiat, menjaga keamanan dan kenyamanan, mejaga kelestarian lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Objek dalam pariwisata syariah dapat berupa: wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata cagar alam (taman konservasi), wisata pertanian (agrowisata) dan wisata buatan yang dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Sebenarnya destinasi wisata syariah tidak bisa dispesifikkan, hanya saja wisata syariah ini sebagaimana konsep dan karakteristiknya. Didalam kegiatan wisata syariah ini harus ada fasilitas yang menunjang kebutuhan wisatawan muslim seperti: menyediakan makanan halal, fasilitas shalat, fasilitas di kamar mandi untuk berwudhu, arah kiblat di kamar hotel, informasi waktu shalat, pelayanan saat bulan ramadhan, pencantuman label tidak halal untuk mengetahui produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh muslim, dan fasilitas rekreasi yang

memisahkan antara pria dan wanita. Bisa juga ditambahkan interpretasi objek wisata yang dimasukkan unsur nilai-nilai Islam sebagai pengingat dan renungan bagi muslim.[47]

Pariwisata syariah yaitu wisatawan atau pengunjung muslim yang melakukan perjalanan ketujuan yang mana Islam merupakan agama yang dominan, seringkali juga dilakukan karena berhubungan dengan agama. Fatwa DSN-MUI No 108/DSNMUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata terhadap prinsip syariah menyatakan bahwa wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan peinsip syariah. Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas untuk ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas dan masyarakat yang saling berkaitan dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan syraiah.[48]

Pandangan Islam terkait perjalanan dan wisata antara lain:

a. Perjalanan sebagai ibadah, hal ini dikarenakan perintah untuk melaksanakan satu kewajiban dalam rukun Islam yaitu haji bagi yang mampu pada bulan tertentu dan umrah yang dilaksanakan sepanjang tahun ke Baitullah (Ka'bah)
b. Pariwisata ini sangat erat hubungannya dengan konsep pengetahuan dan kegiatan pembelajaran. Hal tersebut menjadikan suatu perjalanan terbesar yang dilakukan pada masa awal Islam dengan bertujuan mencari dan menyebarkan ilmu pengetahuan.
c. Wisata dalam Islam bertujuan mempelajari ilmu pengetahuan dan bagaimana cara seorang muslim untuk bertafakur atas segala ciptaan Allah SWT. Perintah untuk melakukan wisata di muka bumi muncul dalam Al-Quran (Q.S Al-An'am :11-12 dan An-Naml : 69-70)
d. Tujuan besar lainnya yaitu melakukan syiar dan menunjukan keagunngan Allah SWT dan Rasulnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pariwisata syariah yaitu kegiatan wisata yang didukung dengan fasilitas yang memadai atau sesuai prinsip syariah dan memberikan kenyamanan bagi para pengunjung (wisatawan) baik itu wisatawan muslim maupun non-muslim.

---

[47] Unggul Priyadi. (2016). *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan,* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

[48] Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Terhadap Prinsip Syariah.

Menurut Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif dan Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Umum Indonesia (DSN-MUI), pariwisata syariah memiliki kreteria umum sebagai berikut:

a. Berorientasi pada kemaslahatan umum

b. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenagan

c. Menghindari kemusryikan dan khurafat

d. Menghindari maksiat

e. Menjaga perilaku, etika dan nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedois dan asusila
f. Menjaga amanah, keamanan, dan kenuamanan

g. Bersifat universal dan inklunsif

h. Menjaga kelestarian lingkungan

i. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal

Faktor pengukuran wisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karateristik tersendiri, yaitu:

a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan
b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormti prinsip prinsip Islam
c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip Islam
e. Restoran harus mengikuti standar internasional palayanan halal

f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi

g. Ada tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan

h. Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

B. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk melakukan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan, berikut adalah beberapa judul penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
1	Aditya Rizal Pratama dan Trisna Putra	2023	Atraksi Wisata Berbasis Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Kubu Gadang	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ada beberapa aplikasi lapangan yang berhubungan dengan atraksi wisata di Kubu Gadang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kubu Gadang melalui 5 prinsip dari CBT yang diurutkan dari yang paling kuat yaitu prinsip budaya, ekonomi, sosial, politik dan lingkungan. Yang menunjukan ada beberapa hal yang dilakukan oeh masyarakat Kubu Gadang dalam mengembangkan community based tourism (CBT) mereka.
2	Herni Nur Hidayah dan Agustina Tri Wijayant	2020	Strategi Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Berbasis Community Based Tourism (Cbt) Pada Masa pandemi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan Desa Wisata Nglanggeran pada masa pandemi dilakukan dengan meningkatkan pemahaman teknologi pada masyarakat, meningkatkan wisata edukasi dan budaya, pengadaan ulang program live in, meningkatkan pendapatan dan

				kesejahteraan masyarakat, pembangunan wisata baru dan penambahan fasilitas, meningkatkan promosi mancanegara, melakukan pembangunan fasilitas penunjang covid-19, pengadaan virtual tour, penjualan produk olahan secara online, dan meningkatkan kualitas Kedung Kandang Glamping. Strategi pengembangan ini memenuhi aspek dalam community based tourism yang terdiri dari ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik.
3	Debby Fifiyanti, Muhammad Luqman Taufiq, Kris Cahyani Ermawati	2023	Penerapan Konsep Community Based Tourism Dalam Pengembangan Desa Wisata Burai	Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan destinasi wisata di Desa Burai, Ogan Ilir berawal dari inisiatif masyarakat lokal yang disebut dengan local hero yang kemudian mengajak masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam mengembangkan desa wisata dan menggali potensi wisata yang ada, membentuk lembaga atau kelompok masyarakat untuk mengelolah destinasi wisata, melakukan kegiatan konservasi lingkungan dan membuat beberapa usaha masyarakat lokal.
4	Vidya Yanti Utami Siti Yulianah M., Yusuf,	2022	Penerapan Community Based Tourism	Hasil Penelitia n menunjukkan bahwa penerapan CBT dari aspek ekonomi dan social pada

	Johan Mashuri		Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Upaya Pemberday Aan Sosial Ekonomi Masyarakat	Desa Wisata Kebon Ayu memberikan manfaat dan dampak positif, seperti terciptanya lapangan pekerjaan, adanya pendapatan baru bagi masyarakat, peningkatan kualitas hidup, peningkatan kebang gaan pada komunitas, dan kesediaan serta kesetiaan masyarakat untuk terlibat dalam tiap kegiatan di Desa Wisata Kebon Ayu sehingga pengembangan Desa Wisata dapat berkelanjutan.
5	Hastuti, Har Fajar Maulana, Mahyudin, Abdul Rahim	2024	Pengembangan Pariwisata Berbasis Community Based Tourism pada Desa Wisata Waburi Park Buton Selatan	CBT memiliki potensi untuk mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan di wilayah tersebut. Pelatihan dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata di wilayah mereka, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui integrasi dengan sektor pariwisata, dan membangun sinergi positif antara ekonomi lokal dan sektor pariwisata.
6	Khairunnisa Khalda Syafiqah, Dir Aprilia, Fadira Maharani	2022	Implementasi Konsep Community Based Tourism (CBT) Dalam Mendukung Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan pada Destinasi	Hasil penelitian yang didapatkan bahwa masyarakat setempat sudah dapat mengimplementasikan konsep Community Based Tourism (CBT) dengan cukup aktif untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Namun,

			Wisata Sanghyang Kenit di Kabupaten Bandung Barat	tingkat implementasiknya belum sempurna, masih terdapat beberapa penghambat dalam pemenuhan indikator implementasi Community Based Tourism (CBT) berdasarkan 5 prinsip (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, politik) yang diusung oleh UNEP dan WTO
7	Agnessy Siahaan, Harisan Boni Firmand, Bambang T. J. Hutagalung , Yulia K.S. Sitepu, Ade Putera Arif Panjaitan	2023	Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Desa Meat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba	Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya: (b) (a) sumber daya alam dan budaya, menunjukan bahwa dengan potensi yang dimiliki desa tersebut dapat menunjang kedatangan pengunjung, kelompok masyarakat guna untuk meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan dan melestarikan adat budaya yang ada di Desa Meat (c) pemerintah desa yang ikut berperan penting dalam upaya pengembangan desa agar dapat menarik perhatian wisatawan jika sudah memenuhi tujuh sapta pesona pariwisata, peran masyarakat yang ikut serta dalam melakukan kegiatan desa agar desa tetap bersih, aman dan sejuk sehingga siapapun yang datang berkunjung dapat menikmati atraksi wisata yang ada di Desa Meat.

8	Amelia Pirdiani Lestari, Rosiady Husaenie Sayuti, Nila Kusuma	2023	Community Based Tourism (CBT) Sebagai Strategi Pengembangan Ecotourism di Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur	Hasil penelitian terdapat beberapa strategi yang dilakukan yaitu penyediaan Akomodasi, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Transfortasi, Fasilitas Pendukung Pariwisata, PengembanganDesa Wisata, dan Promosi. Sementara implikasi yang terjadi adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru, meningkatnya kualitas hidup, meningkatnyapengetahuanserta semakin dikenal masyarakat desa Sembalun Lawang luas. Serta kendala yang terjadi diantaranya minimnya pemahaman masyarakat, danya konflik, tidak adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan masyarakat Desa Sembalun Lawang dalam pengembangan ecotourism menggunakan Comunity Based Tourism sudah berjalan dengan baik mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan yang membuat munculnya implikasi di masyarakat desa Sembalun Lawang.
9	Jean Erichson Behar	2023	Strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Air	Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek wisata air terjun Waimarang sudah memiliki unsur-unsur

			Terjun Waimarang, Kabupaten Sumba Timur	pengembangan pariwisata yaitu atraksi, aksebilitas, akomodasi, dan lembaga sehingga layak untuk dikatakan sebagai objek wisata. Akan tetapi, dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, pelaksanaanya belum optimal karna belum memenuhi elemen-elemen keberhasilan dari Community Based Tourismyaitu tidak memiliki organisasi khusus wisata dan manajemen wisata yang kurang baik dari masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkannya analisis SWOT guna merumuskan strategi pengembangan pariwisata air terjun Waimarang.Strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat diair terjun Waimarang, kabupaten Sumba Timur adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy) yang terletak di kuadran I pada diagram SWOT. Adapun strategi yang diperoleh yaitu Strategi SO yang memanfaatkan kekuatan untuk memaksimalkan peluang. Strategi SO yang bisaditerapkan

				dalam pengembangan pariwisata di air terjun Waimarang yaitu, (1) menggali potensi wisata yang ada (2) mengemas berbagai atraksi alam dan budaya yang ada di kawasan objek wisata (3) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada, (4) membuat brand image destinasi pariwisata Waimarang.
10	Juardi, Deni Handani , Sukarni Novita Sari	2020	Strategi Pengembangan Potensi Wisata Desa Bukit Telago Dalam Perspektif Community Based Tourism	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di wisata Bukit Telago hanya pada masyarakat sekitar desa dan strategi pengembangan yang digunakan melibatkan tiga pilar yaitu desa, masyarakat dan pengusaha lokal yang saling terintegrasi.

Sumber : data diolah 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional bearti kegiatan penelitian ini dilakukan dengan ciriciri yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis bearti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.[49]

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk memahami fenomena dan gejala sosial dengan menitikberatkan kepada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang diteliti.[50] Penelitian deskritif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumen. Untuk memperoleh gambaran dilapangan pada Strategi pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok Di Bukittunggi Berbasis Community Based Tourism.

---

[49] Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. hal 2.

[50] Zuchri Abdussamad, (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press. hal 30.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan Di Jalan Lapau Batu, Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi. Adapun waktu dalam pelaksanaan penelitian ini pada tahun 2026 sampai selesai.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini bersifat deskritif yang menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan strategi pengembangan berbasis Community Based Tourism. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu:

1. Data primer

   Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya dengan observasi, wawancara, diskusi berfokus. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah terkait dengan informasi Wisata Tapian Tabiang Barasok.

2. Data sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu biro pusat statistik, buku, laporan, jurnal dan lainnya.[51] Adapun data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu melalui karya ilmiah, buku, , arsip dokumen lainya.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar mengetahui permasalahan akan

[51] Soni Faisal Rinaldi dan Bagya Mujianto, (2017). *Metodologi Penelitian dan Statistik*. hal. 91.

diteliti. Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga jenis informan yaitu informan kunci, Informan utama dan informan pendukung.

Informan kunci adalah orang yang mengetahui tentang fenomena atau permasalahan yang diteliti. Informan utama yaitu informan yang mengetahui dan memahami mengenai fenomena atau permasalahan yang diteliti. Informan pendukung yaitu informan yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap pembahasan dalam penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, informan yang dapat memberikan informasi tentang Strategi Pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok Berbasis *Community Based Tourism* yaitu Pengelola Destinasi, Mayarakat lokal, Pokdarwis, dan untuk jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 150 informan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[52] Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Teknik observasi yaitu dengan cara mendengar, serta melihat perilaku atau fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian dalam rangka memperoleh data penelitian. Peneliti melakukan observasi langsung ke Tapian Tabiang Barasok.

2. Wawancara

Suatu teknik dalam pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dan mencatat atau merekam jawabanjawaban informan.[53] Metode wawancara yang yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan

[52] Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta:Bandung. hlm.
[53] Suharsimi Arikunto, (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rhineka Cipta: Jakarta. hlm. 202.

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait Pengelola Destinasi, Mayarakat lokal, Pokdarwis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi suatu proses untuk mempeoleh keterangan tujuan penelitian dari data yang berbentuk arsip (dokumen), karena dokumen suatu sumber data yang tertulis atau berbentuk foto. Teknik dokumentasi bermanfaat dalam melengkapi hasil pengumpulan data melaui observasi dan wawancara. Dokumen yang diambil dijadikan sebagai data pendukung penelitian supaya hasil penelitian yag dilakukan dapat disajikan lebih valid dan lengkap, dan peneliti melakukan dokumentasi saat proses wawancara dengan informan terkait.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisi data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Teknik anslisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermen mencakup tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[54]

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dari catatan yang tertulis di lapangan saat penelitian, reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Mereduksi data bearti merangkum hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demekian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Perolehan sumber data yakni dengan wawancara,

[54] Barowi dan Suwandi, (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta. hal. 209.

observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana strategi pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok Berbasis *Community Based Tourism*.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah Penyajian data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami.[55] Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data bertujuan supaya peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya. Langkah kedua dalam analisis data ini, penulis mendeskripsikan tentang gambaran umum megenai Wisata Tapian Tabiang Barasok dengan pendekatan *Community Based Tourism* untuk mendapatkan strategi dalam pengembangan dalam meningkatkan minat berkunjung wisatawan.

[55] Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.. hlm. 434.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi objek penelitian

1. Profil destinasi wisata Tapian Tabiang Barasok

Wisata Tapian Tabiang Barasok merupakan salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kelurahan Bukik Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Destinasi ini terletak di kawasan bibir Ngarai Sianok sehingga menawarkan panorama alam yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Dari kawasan Tapian Tabiang Barasok, pengunjung dapat menikmati pemandangan tebing-tebing curam Ngarai Sianok yang berpadu dengan hamparan pepohonan hijau serta panorama beberapa gunung di Sumatera Barat, seperti Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Talamau, dan Gunung Pasaman. Pada pagi hari, kawasan ini sering diselimuti kabut atau lautan awan (*barasok*) yang menjadi asal-usul penamaan destinasi tersebut dan menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan untuk menikmati pemandangan matahari terbit.

Tapian Tabiang Barasok merupakan destinasi wisata yang relatif baru di Kota Bukittinggi. Kawasan ini mulai beroperasi dan dikembangkan sebagai objek wisata pada tahun 2024 sebagai salah satu upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata alam yang dimiliki Kota Bukittinggi. Pengembangan destinasi dilakukan dengan memanfaatkan potensi alam yang masih asri tanpa menghilangkan karakteristik lingkungan sekitar. Keberadaan destinasi ini diharapkan mampu menjadi alternatif wisata alam selain destinasi-destinasi unggulan yang telah lebih dahulu dikenal di Kota Bukittinggi, seperti Jam Gadang dan Ngarai Sianok. Selain menawarkan panorama alam, Tapian Tabiang Barasok juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata edukasi, fotografi, rekreasi keluarga, dan wisata berbasis masyarakat.

Dalam pengelolaannya, Wisata Tapian Tabiang Barasok menerapkan konsep pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*), di mana masyarakat lokal berperan sebagai pelaku utama dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi. Pengelolaan dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang bekerja sama dengan pemerintah kelurahan serta berbagai pihak terkait. Seluruh proses perencanaan, pembangunan fasilitas, pengelolaan operasional, hingga evaluasi kegiatan dilakukan melalui musyawarah bersama sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Selain itu,

sebagian besar tenaga kerja yang terlibat dalam operasional wisata berasal dari masyarakat setempat sehingga manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata dapat dirasakan secara langsung oleh komunitas lokal.

Sebagai destinasi wisata alam, Tapian Tabiang Barasok menyediakan berbagai fasilitas penunjang untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan, antara lain area parkir, toilet umum, pusat informasi, gazebo atau area bersantai, warung makan dan minuman, serta beberapa titik swafoto (*photo spot*) yang menghadap langsung ke panorama Ngarai Sianok. Destinasi ini juga telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas keselamatan seperti jalur evakuasi dan layanan pendukung bagi pengunjung. Berdasarkan data pengelola, Tapian Tabiang Barasok beroperasi setiap hari mulai pukul 06.00–18.00 WIB dengan harga tiket masuk sekitar Rp10.000 per orang, sehingga relatif terjangkau bagi berbagai kalangan wisatawan.

f. Visi misi destinasi wisata Tapian Tabiang Barasok

a. Visi

Menjadikan Wisata Tapian Tabiang Barasok sebagai destinasi wisata alam berbasis masyarakat yang berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

b. Misi

1) Mengembangkan potensi wisata alam Tapian Tabiang Barasok melalui pengelolaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas, dan sumber daya manusia dalam pengelolaan destinasi wisata.
3) Melestarikan lingkungan alam, adat istiadat, dan budaya lokal sebagai identitas serta daya tarik utama destinasi wisata.
4) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan usaha lokal dan penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata.
5) Membangun kerja sama yang baik antara Pokdarwis, pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

B. Hasil Penelitian

Strategi pengembangan wisata tapian tabiang barasok di bukittinggi berbasis *Community Based Toursi.*

Wisata tapian tabiang barasok memiliki 5 prinsip pengembangan melalui konsep *Community Based Tourism* siantaranya yaitu :

1. Prinsip ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tapian Tabiang Barasok, penerapan prinsip ekonomi dalam pengembangan desa wisata berorientasi pada keberlanjutan pengelolaan destinasi. Pengelola menjelaskan bahwa tujuan utama pengembangan wisata bukan semata-mata memperoleh keuntungan finansial, melainkan membangun destinasi yang mampu berkembang secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Menurut Pokdarwis, pengembangan objek wisata harus dipandang sebagai sebuah investasi yang memerlukan proses dan pengelolaan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan upaya menjaga kualitas dan keberlangsungan objek wisata. Dengan konsep tersebut, keberhasilan pengelolaan tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan destinasi untuk terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Orientasi terhadap keberlanjutan tersebut kemudian diwujudkan melalui upaya membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pokdarwis menjelaskan bahwa semakin berkembangnya Tapian Tabiang Barasok akan semakin besar pula kesempatan masyarakat untuk memperoleh tambahan pendapatan dari berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pariwisata. Kehadiran wisatawan mendorong masyarakat membuka usaha kuliner, berjualan makanan dan minuman, menyediakan jasa parkir, menjual hasil kerajinan maupun produk lokal, serta memanfaatkan potensi lain yang dapat menunjang kebutuhan wisatawan. Menurut pengelola, aktivitas tersebut secara perlahan telah menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya lebih bergantung pada sektor pertanian atau pekerjaan lainnya. Walaupun peningkatan pendapatan setiap rumah tangga tidak sama, Pokdarwis menilai bahwa perkembangan destinasi telah memberikan dampak ekonomi yang positif dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.

Selain menciptakan peluang usaha, berkembangnya aktivitas pariwisata juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dalam pengelolaan destinasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Pokdarwis menjelaskan bahwa masyarakat lokal selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan operasional wisata. Kegiatan

seperti pengelolaan kawasan, pemeliharaan fasilitas, kebersihan lingkungan, pengaturan parkir, hingga pelayanan kepada wisatawan sebagian besar melibatkan warga yang berasal dari sekitar kawasan Tapian Tabiang Barasok. Menurut pengelola, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memberdayakan masyarakat sekaligus memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat dinikmati oleh warga setempat. Keterlibatan masyarakat juga dipandang mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap objek wisata sehingga masyarakat terdorong untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Penggunaan tenaga kerja dari luar daerah hanya dilakukan apabila terdapat kebutuhan terhadap keahlian tertentu yang belum tersedia di lingkungan masyarakat setempat.

Meningkatnya aktivitas ekonomi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata juga berdampak pada bertambahnya pendapatan yang diperoleh dari operasional destinasi. Namun demikian, Pokdarwis menjelaskan bahwa pendapatan tersebut tidak sepenuhnya dibagikan sebagai keuntungan kepada pengelola ataupun masyarakat, melainkan sebagian besar dialokasikan kembali untuk mendukung pengembangan Tapian Tabiang Barasok. Menurut pengelola, keberlanjutan destinasi hanya dapat dicapai apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan wisata dimanfaatkan kembali untuk meningkatkan kualitas objek wisata. Oleh karena itu, dana yang terkumpul digunakan untuk pemeliharaan fasilitas yang telah ada, pembangunan sarana pendukung baru, perbaikan akses menuju lokasi wisata, penambahan fasilitas bagi pengunjung, peningkatan kebersihan kawasan, serta mendukung kegiatan promosi agar Tapian Tabiang Barasok semakin dikenal oleh masyarakat luas. Pengelola menilai bahwa langkah tersebut merupakan bentuk investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar di masa mendatang.

Dalam proses pengalokasian dana tersebut, Pokdarwis menjelaskan bahwa setiap keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah bersama. Seluruh rencana penggunaan anggaran dibahas berdasarkan kebutuhan prioritas pengembangan destinasi sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran. Menurut pengelola, mekanisme musyawarah tidak hanya bertujuan menentukan prioritas pembangunan, tetapi juga menjadi bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan desa wisata. Melalui keterbukaan tersebut, masyarakat mengetahui bahwa pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pariwisata benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama dan pengembangan objek wisata. Pengelola meyakini bahwa transparansi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, karena keberhasilan pengelolaan desa wisata tidak hanya bergantung pada

besarnya pendapatan, tetapi juga pada dukungan masyarakat terhadap sistem pengelolaan yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa seluruh aspek pengelolaan ekonomi di Tapian Tabiang Barasok saling berkaitan satu sama lain. Pengembangan destinasi yang dilakukan secara berkelanjutan mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat, peningkatan aktivitas ekonomi menciptakan kesempatan kerja bagi warga lokal, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan wisata kembali dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan kualitas destinasi. Siklus tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak berhenti pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi sumber pembiayaan bagi keberlanjutan pengelolaan desa wisata. Dengan demikian, prinsip ekonomi dalam *Community Based Tourism* telah diterapkan melalui pengelolaan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan keuntungan untuk kepentingan bersama, serta pembangunan destinasi secara berkelanjutan sehingga Tapian Tabiang Barasok diharapkan mampu terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat setempat.

2. Prinsip sosial

Penerapan prinsip sosial dalam pengembangan desa wisata menunjukkan bahwa keberadaan aktivitas pariwisata tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga membawa perubahan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pengelola menjelaskan bahwa pengembangan wisata dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan. Melalui pola pengelolaan berbasis masyarakat tersebut, wisata Tapian Tabiang Barasok tidak hanya dipandang sebagai objek kunjungan, tetapi juga sebagai ruang bersama yang mendorong tumbuhnya kepedulian sosial, kebersamaan, dan partisipasi warga dalam menjaga keberlanjutan destinasi. Menurut pengelola, keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya diukur dari jumlah wisatawan yang datang, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat sosial dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberadaan objek wisata.

Keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan destinasi secara tidak langsung turut mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Pengelola menjelaskan bahwa berkembangnya Tapian Tabiang Barasok memberikan pengaruh terhadap peningkatan perhatian terhadap infrastruktur pendukung di kawasan wisata maupun lingkungan desa. Perbaikan akses jalan menuju lokasi wisata menjadi salah satu kebutuhan utama agar

mobilitas wisatawan dan masyarakat menjadi lebih mudah. Selain itu, keberadaan wisata juga mendorong peningkatan fasilitas umum seperti penyediaan air bersih, perbaikan area parkir, pembangunan tempat istirahat, toilet umum, serta peningkatan jaringan komunikasi yang dibutuhkan wisatawan maupun masyarakat. Meskipun sebagian pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan dukungan pemerintah, masyarakat mulai merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pengelola, infrastruktur yang semakin baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga mempermudah aktivitas masyarakat dalam bekerja, berusaha, maupun berinteraksi dengan wilayah lain sehingga kualitas hidup masyarakat secara umum mengalami peningkatan.

Perbaikan kualitas hidup tersebut kemudian memberikan dampak sosial yang lebih luas, yaitu meningkatnya rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya sendiri. Pengelola menjelaskan bahwa masyarakat merasa senang ketika wisatawan dari berbagai daerah datang berkunjung ke Tapian Tabiang Barasok. Kehadiran wisatawan dipandang sebagai bentuk apresiasi terhadap potensi alam yang dimiliki desa sekaligus menjadi bukti bahwa kawasan tersebut memiliki daya tarik yang mampu bersaing dengan destinasi wisata lainnya. Rasa bangga tersebut terlihat dari semakin tingginya kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan, memberikan pelayanan yang ramah kepada wisatawan, serta ikut mempromosikan objek wisata melalui media sosial maupun kepada kerabat yang datang berkunjung. Menurut pengelola, antusiasme masyarakat dalam menyambut wisatawan menunjukkan bahwa keberadaan desa wisata telah membentuk identitas baru bagi masyarakat, yaitu sebagai komunitas yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga citra positif daerahnya di mata pengunjung.

Pengelola juga menambahkan bahwa tumbuhnya rasa bangga masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga karena masyarakat merasa memiliki peran langsung dalam keberhasilan pengembangan destinasi. Seluruh proses pengelolaan dilakukan secara gotong royong sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pembangunan desa wisata. Setiap kegiatan seperti kerja bakti, perbaikan fasilitas, penyelenggaraan kegiatan wisata, maupun promosi destinasi dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat dan Pokdarwis. Menurut pengelola, keterlibatan tersebut mempererat hubungan sosial antarwarga karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga dan mengembangkan Tapian Tabiang Barasok agar tetap menjadi destinasi wisata yang menarik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Sejalan dengan tingginya partisipasi masyarakat, pengelola menjelaskan bahwa pengelolaan Tapian Tabiang Barasok dilaksanakan tanpa membedakan status gender maupun usia. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dalam Pokdarwis maupun terlibat dalam berbagai kegiatan pengelolaan wisata. Perempuan, laki-laki, maupun generasi muda diberikan ruang yang sama untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah, mengikuti proses pengambilan keputusan, serta berpartisipasi dalam kegiatan operasional sesuai dengan kemampuan, minat, dan tanggung jawab masing-masing. Menurut pengelola, pembagian tugas dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan kebutuhan organisasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, tidak terdapat pembatasan bagi perempuan maupun pemuda untuk menempati posisi tertentu dalam kepengurusan maupun dalam kegiatan pengelolaan desa wisata.

Keterlibatan perempuan dan generasi muda menjadi salah satu kekuatan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan Tapian Tabiang Barasok. Generasi muda banyak berkontribusi dalam pengembangan promosi digital, dokumentasi kegiatan, pengelolaan media sosial, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan wisata yang membutuhkan kreativitas dan inovasi. Sementara itu, perempuan juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, pelayanan wisata, pengelolaan konsumsi, administrasi, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat. Meskipun terdapat pembagian tugas berdasarkan kemampuan masing-masing, seluruh anggota tetap bekerja secara kolektif dan saling mendukung dalam setiap kegiatan. Menurut pengelola, pola kerja seperti ini mencerminkan semangat kebersamaan dan kesetaraan yang menjadi dasar pengelolaan wisata berbasis masyarakat, sehingga tidak ada kelompok yang merasa lebih dominan dibandingkan kelompok lainnya.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan mendorong peningkatan kualitas infrastruktur dan kualitas hidup, kondisi tersebut kemudian menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya, yang selanjutnya memperkuat partisipasi warga dalam menjaga dan mengembangkan destinasi wisata. Di sisi lain, penerapan prinsip kesetaraan melalui pelibatan perempuan, laki-laki, dan generasi muda tanpa adanya perbedaan status semakin memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas. Dengan demikian, prinsip sosial dalam *Community Based Tourism* di Tapian Tabiang Barasok tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, tetapi juga melalui terbentuknya pengelolaan yang inklusif, partisipatif, dan berlandaskan semangat gotong royong sebagai fondasi utama keberlanjutan desa wisata.

3. Prinsip Budaya

Penerapan prinsip budaya dalam pengembangan desa wisata dilakukan dengan menjadikan budaya lokal sebagai salah satu identitas utama destinasi. Pengelola menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan potensi alam, tetapi juga diarahkan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh masyarakat secara turun-temurun. Menurut pengelola, keberadaan desa wisata menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya lokal kepada wisatawan sekaligus mendorong masyarakat agar tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat yang menjadi ciri khas daerah. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengembangan wisata selalu diupayakan agar tetap selaras dengan norma adat yang berlaku sehingga perkembangan pariwisata tidak menghilangkan identitas budaya masyarakat.

Komitmen tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai upaya pelestarian tradisi dan budaya lokal yang masih terus dilakukan oleh masyarakat bersama Pokdarwis. Pengelola menjelaskan bahwa keberadaan aktivitas pariwisata telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk kembali menampilkan berbagai kesenian, tradisi, maupun kebiasaan yang sebelumnya hanya dilaksanakan pada momen-momen tertentu. Meskipun Tapian Tabiang Barasok lebih dikenal sebagai destinasi wisata alam, pengelola tetap berupaya melibatkan unsur budaya lokal dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan, seperti penyambutan tamu pada acara tertentu, penggunaan kuliner khas daerah, serta pengenalan adat istiadat kepada wisatawan. Menurut pengelola, kehadiran wisatawan secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap pelestarian budaya karena mereka menyadari bahwa budaya lokal merupakan bagian dari daya tarik yang membedakan Tapian Tabiang Barasok dengan destinasi wisata lainnya.

Pengelola juga menjelaskan bahwa revitalisasi budaya yang dilakukan tidak bertujuan mengubah bentuk asli tradisi agar lebih menarik bagi wisatawan, melainkan menghidupkan kembali kebiasaan masyarakat agar tetap dikenal oleh generasi muda dan pengunjung. Berbagai kegiatan budaya yang masih dilaksanakan tetap mengacu pada tata cara yang berlaku di masyarakat tanpa menghilangkan makna maupun nilai yang terkandung di dalamnya. Menurut Pokdarwis, pelestarian budaya harus dilakukan secara alami sesuai dengan kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga budaya yang ditampilkan tidak sekadar menjadi tontonan, tetapi tetap menjadi bagian dari identitas masyarakat. Dengan demikian, aktivitas pariwisata dipandang sebagai media untuk

memperkenalkan budaya lokal tanpa mengubah esensi yang telah diwariskan oleh para leluhur.

Dalam menjaga keaslian budaya (*authenticity*), pengelola mengakui bahwa perkembangan pariwisata sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut terutama terlihat pada cara masyarakat mempromosikan budaya melalui media sosial, penyelenggaraan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan promosi wisata, maupun meningkatnya interaksi dengan wisatawan dari berbagai daerah. Namun demikian, pengelola menegaskan bahwa perubahan tersebut masih berada pada batas yang wajar dan belum mengubah nilai-nilai dasar adat maupun pelaksanaan tradisi yang berlaku di masyarakat. Menurut pengelola, hingga saat ini masyarakat tetap berkomitmen mempertahankan keaslian budaya dan tidak melakukan perubahan secara berlebihan hanya untuk memenuhi kepentingan komersial. Setiap tradisi maupun kegiatan adat tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat, sehingga nilai-nilai budaya yang diwariskan masih tetap terjaga.

Pengelola menjelaskan bahwa salah satu upaya mempertahankan keaslian budaya dilakukan melalui keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat setempat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan budaya. Kehadiran para tokoh tersebut menjadi bentuk pengawasan agar setiap aktivitas wisata tetap menghormati norma dan adat istiadat yang berlaku. Menurut pengelola, apabila terdapat kegiatan yang berpotensi mengurangi nilai budaya atau bertentangan dengan kebiasaan masyarakat, maka akan dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Pendekatan tersebut dilakukan agar pengembangan pariwisata tetap berjalan tanpa menghilangkan jati diri budaya masyarakat. Dengan adanya keterlibatan seluruh unsur masyarakat, keseimbangan antara kepentingan pengembangan wisata dan pelestarian budaya dapat terus dipertahankan.

Selain menjaga keaslian budaya, pengelola juga berupaya memberikan edukasi kepada wisatawan mengenai norma dan adat yang berlaku di kawasan wisata. Pengelola menjelaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat pedoman tertulis atau *code of conduct* yang dipasang secara khusus di kawasan wisata, namun edukasi kepada wisatawan tetap dilakukan secara langsung melalui arahan dari pengelola maupun anggota Pokdarwis ketika wisatawan berkunjung. Wisatawan diberikan informasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan, menghormati masyarakat setempat, menjaga sopan santun selama berada di kawasan wisata, serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Menurut pengelola, pendekatan secara lisan dinilai lebih efektif karena komunikasi dapat dilakukan secara langsung sehingga

wisatawan lebih mudah memahami nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat setempat. Meskipun demikian, pengelola juga menyadari bahwa penyusunan panduan tertulis di masa mendatang akan menjadi langkah yang baik untuk memperkuat edukasi kepada wisatawan.

Keberadaan pariwisata mendorong masyarakat untuk terus melestarikan tradisi dan budaya lokal, sementara komitmen masyarakat dalam mempertahankan keaslian budaya menjadi faktor penting yang menjaga identitas desa wisata. Di sisi lain, upaya memberikan edukasi kepada wisatawan mengenai norma dan adat istiadat menjadi bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat. Meskipun perkembangan pariwisata mulai memberikan sedikit pengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat, perubahan tersebut masih berada dalam batas yang dapat diterima dan belum menghilangkan esensi budaya lokal. Dengan demikian, prinsip budaya dalam *Community Based Tourism* di Tapian Tabiang Barasok telah diterapkan melalui pelestarian tradisi, menjaga keaslian budaya, serta membangun kesadaran wisatawan untuk menghormati norma dan adat istiadat masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

4. Prinsip Lingkungan

Prinsip lingkungan dalam pengembangan desa wisata menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam menjaga keberlanjutan destinasi. Pengelola menjelaskan bahwa keberadaan wisata Tapian Tabiang Barasok yang mengandalkan keindahan alam sebagai daya tarik utama menuntut adanya upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tetap terpelihara. Menurut pengelola, keberhasilan pengembangan wisata tidak hanya ditentukan oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam menjaga kondisi alam sehingga tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, masyarakat bersama Pokdarwis berupaya menanamkan kesadaran bahwa kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga melalui berbagai kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan kawasan wisata.

Sebagai bentuk menjaga keseimbangan lingkungan, pengelola menjelaskan bahwa hingga saat ini belum diterapkan sistem pembatasan jumlah pengunjung (*carrying capacity*) di kawasan wisata. Hal tersebut disebabkan karena kondisi kawasan Tapian Tabiang Barasok masih memiliki area yang cukup luas sehingga dinilai masih mampu menampung jumlah wisatawan yang datang tanpa menimbulkan kepadatan yang berlebihan. Menurut pengelola, selama ini belum ditemukan kondisi yang menunjukkan

bahwa jumlah pengunjung telah melampaui daya dukung kawasan atau menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Meskipun demikian, pengelola tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan, terutama pada saat jumlah kunjungan meningkat pada hari libur atau musim tertentu. Apabila ditemukan potensi kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan, Pokdarwis menyatakan siap melakukan penyesuaian terhadap sistem pengelolaan agar keseimbangan antara aktivitas wisata dan kelestarian alam tetap terjaga.

Tidak diterapkannya pembatasan jumlah pengunjung tidak berarti pengelola mengabaikan upaya pelestarian lingkungan. Pengelola menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan lebih menitikberatkan pada peningkatan kesadaran wisatawan dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan serta kelestarian kawasan wisata. Setiap pengunjung diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan area wisata, serta tidak merusak vegetasi maupun fasilitas yang tersedia. Selain itu, masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan juga secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi kawasan agar apabila ditemukan kerusakan dapat segera ditangani. Menurut pengelola, pendekatan berbasis kesadaran masyarakat dinilai lebih sesuai dengan kondisi Tapian Tabiang Barasok karena pengelolaan wisata masih dilakukan secara sederhana dengan mengedepankan semangat gotong royong.

Dalam aspek pengelolaan limbah wisata, pengelola menjelaskan bahwa sistem yang diterapkan saat ini masih dilakukan secara manual. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas wisata dikumpulkan oleh pengelola dan masyarakat, kemudian dipisahkan secara sederhana sebelum dibuang ke tempat pembuangan yang telah disediakan. Kegiatan pembersihan kawasan wisata dilakukan secara rutin melalui kerja bakti yang melibatkan anggota Pokdarwis dan masyarakat sekitar, terutama setelah akhir pekan atau ketika jumlah kunjungan wisatawan meningkat. Pengelola mengakui bahwa hingga saat ini belum tersedia sistem pengelolaan limbah yang modern maupun fasilitas pemilahan sampah yang lengkap. Namun demikian, berbagai upaya terus dilakukan untuk menjaga kebersihan kawasan sehingga sampah tidak menumpuk dan tidak mengganggu kenyamanan wisatawan maupun kelestarian lingkungan. Menurut pengelola, keterbatasan sarana yang ada tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebersihan, sehingga kegiatan gotong royong tetap menjadi strategi utama dalam menjaga kondisi kawasan wisata.

Sejalan dengan upaya menjaga kebersihan kawasan, pengelola juga menjelaskan bahwa sebagian pendapatan yang diperoleh dari aktivitas wisata dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pelestarian lingkungan. Dana tersebut tidak dialokasikan dalam bentuk program konservasi yang bersifat khusus, tetapi lebih

difokuskan pada kegiatan pemeliharaan kawasan, seperti perbaikan fasilitas yang rusak, pembersihan lingkungan, penataan kawasan wisata, serta penanaman pohon apabila diperlukan. Menurut Pokdarwis, penggunaan dana tersebut merupakan bentuk investasi jangka panjang agar kondisi lingkungan tetap terjaga dan daya tarik wisata alam Tapian Tabiang Barasok tidak mengalami penurunan. Pengelola berpendapat bahwa menjaga kualitas lingkungan merupakan bagian penting dari keberlanjutan desa wisata karena kondisi alam yang bersih dan asri menjadi alasan utama wisatawan datang berkunjung.

Kegiatan pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pokdarwis, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar melalui berbagai kegiatan gotong royong dan kerja bakti yang dilaksanakan secara berkala. Kegiatan tersebut meliputi pembersihan area wisata, perawatan fasilitas umum, pemotongan rumput, pembersihan saluran air, hingga penanaman pohon pada beberapa titik yang dianggap memerlukan penghijauan. Selain masyarakat, wisatawan juga sering diingatkan secara lisan agar ikut menjaga kebersihan selama berada di kawasan wisata. Menurut pengelola, keterlibatan seluruh pihak menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelestarian lingkungan karena pengembangan desa wisata berbasis masyarakat hanya dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat dan pengunjung memiliki kepedulian yang sama terhadap lingkungan.

Luasnya kawasan wisata menyebabkan belum diperlukannya pembatasan jumlah pengunjung, namun kondisi tersebut tetap diimbangi dengan pengawasan terhadap lingkungan dan upaya menjaga kebersihan kawasan. Pengelolaan limbah yang masih dilakukan secara manual tidak mengurangi komitmen masyarakat dan Pokdarwis untuk menjaga kebersihan melalui kegiatan gotong royong yang dilakukan secara rutin. Di sisi lain, sebagian pendapatan wisata juga dimanfaatkan untuk mendukung pemeliharaan dan pelestarian kawasan sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga. Dengan demikian, penerapan prinsip lingkungan dalam Community Based Tourism di Tapian Tabiang Barasok telah diwujudkan melalui pengelolaan yang berorientasi pada pelestarian alam, partisipasi aktif masyarakat, serta pemanfaatan hasil pariwisata untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai aset utama desa wisata.

5. Prinsip Politik

Penerapan prinsip politik dalam pengembangan desa wisata menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setempat melalui mekanisme kelembagaan

yang telah disepakati bersama. Pengelola menjelaskan bahwa masyarakat merupakan aktor utama dalam setiap proses pengembangan destinasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Menurut pengelola, pola pengelolaan seperti ini diterapkan agar masyarakat memiliki hak yang sama dalam menentukan arah pembangunan desa wisata serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal. Dengan demikian, keberadaan desa wisata tidak hanya menjadi sarana pengembangan sektor pariwisata, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan musyawarah yang melibatkan anggota Pokdarwis, tokoh masyarakat, pemerintah nagari, serta warga yang terlibat dalam pengelolaan wisata. Pengelola menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas, penataan kawasan wisata, penentuan tarif masuk, penyusunan program kerja, maupun rencana pengembangan destinasi selalu dibahas terlebih dahulu melalui forum musyawarah. Dalam forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memberikan usulan, maupun menyampaikan kritik terhadap rencana yang akan dilaksanakan. Menurut pengelola, keputusan tidak pernah ditentukan oleh satu orang ataupun kelompok tertentu, melainkan dihasilkan melalui kesepakatan bersama sehingga seluruh pihak merasa memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang telah disetujui.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif selama pelaksanaan program. Pengelola menjelaskan bahwa masyarakat tidak hanya hadir dalam forum musyawarah, tetapi juga ikut memberikan ide mengenai pengembangan fasilitas, penyelenggaraan kegiatan wisata, promosi destinasi, hingga upaya menjaga kebersihan dan keamanan kawasan wisata. Menurut pengelola, tingginya partisipasi masyarakat disebabkan oleh adanya kesadaran bahwa keberhasilan Tapian Tabiang Barasok merupakan keberhasilan bersama. Oleh karena itu, setiap keputusan yang telah disepakati akan dilaksanakan secara gotong royong sehingga proses pembangunan desa wisata dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat.

Selain tingginya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, prinsip politik juga tercermin dari kuatnya kepemilikan lokal terhadap seluruh aset wisata. Pengelola menjelaskan bahwa lahan, fasilitas pendukung, serta berbagai sarana yang digunakan dalam kegiatan wisata merupakan aset yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat melalui Pokdarwis. Hingga saat ini tidak terdapat investor luar maupun pihak swasta yang menguasai aset-aset utama di kawasan wisata. Menurut pengelola, sejak awal

pengembangan Tapian Tabiang Barasok disepakati bahwa pengelolaan harus tetap berada di tangan masyarakat agar manfaat yang dihasilkan dapat kembali kepada masyarakat dan tidak didominasi oleh kepentingan pihak luar. Dengan sistem tersebut, masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukan arah pengembangan destinasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

Dominasi kepemilikan lokal tersebut juga memberikan dampak terhadap kemandirian masyarakat dalam mengelola desa wisata. Pengelola menjelaskan bahwa setiap pembangunan maupun penambahan fasilitas dilakukan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat dan kemampuan yang dimiliki oleh Pokdarwis bersama masyarakat. Apabila diperlukan pembangunan baru atau perbaikan fasilitas, masyarakat akan terlebih dahulu membahas sumber pendanaan, pembagian tugas, serta mekanisme pelaksanaannya secara bersama-sama. Menurut pengelola, pola pengelolaan yang berbasis kepemilikan lokal ini mampu menjaga kemandirian desa wisata karena seluruh aset tetap berada dalam penguasaan masyarakat sehingga keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan investor maupun pihak luar.

Dalam mendukung proses pengelolaan tersebut, Pokdarwis juga telah memiliki struktur organisasi yang jelas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Pengelola menjelaskan bahwa setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang masing-masing, seperti ketua, sekretaris, bendahara, serta anggota yang menangani bidang operasional, kebersihan, promosi, dan pemeliharaan kawasan wisata. Selain struktur organisasi, Pokdarwis juga memiliki aturan dasar organisasi yang menjadi pedoman dalam menjalankan setiap kegiatan sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara terarah dan terkoordinasi. Menurut pengelola, keberadaan kelembagaan yang jelas menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas organisasi serta mempermudah koordinasi antaranggota dalam menjalankan pengelolaan desa wisata.

Pengelola juga menjelaskan bahwa akuntabilitas organisasi diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan secara berkala yang disampaikan kepada masyarakat dalam forum musyawarah atau rapat evaluasi. Seluruh pemasukan yang berasal dari aktivitas wisata maupun pengeluaran untuk operasional dan pembangunan dicatat oleh bendahara, kemudian dilaporkan secara terbuka kepada seluruh anggota dan masyarakat yang berkepentingan. Menurut pengelola, keterbukaan tersebut menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada masyarakat karena seluruh kegiatan wisata dijalankan atas nama masyarakat. Dengan adanya laporan keuangan yang disampaikan secara transparan, masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana yang telah dihimpun sekaligus memberikan masukan apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan keuangan organisasi.

Penerapan prinsip politik dalam pengembangan Tapian Tabiang Barasok telah berjalan dengan baik melalui tingginya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kuatnya kepemilikan lokal terhadap aset-aset wisata, serta keberadaan kelembagaan Pokdarwis yang memiliki struktur organisasi dan sistem pertanggungjawaban yang jelas. Seluruh proses pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat tanpa adanya campur tangan investor maupun pihak luar dalam menentukan arah pembangunan destinasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip politik dalam *Community Based Tourism* telah diwujudkan melalui tata kelola yang partisipatif, demokratis, transparan, dan berbasis kepemilikan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari aktivitas pariwisata, tetapi juga menjadi pemegang kendali utama dalam menentukan keberlanjutan pengembangan Tapian Tabiang Barasok sebagai desa wisata berbasis masyarakat.

C. Pembahasan

1. Prinsip Ekonomi

Pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok telah mengarah pada konsep *Community Based Tourism* (CBT), yaitu menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari kegiatan pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola dan Pokdarwis, manfaat ekonomi tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat, tetapi juga melalui pengelolaan pendapatan wisata yang diprioritaskan untuk mendukung pembangunan dan keberlanjutan destinasi. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas wisata tidak sepenuhnya dibagikan kepada individu, melainkan dialokasikan kembali untuk pemeliharaan fasilitas, pengembangan sarana pendukung, dan peningkatan kualitas pelayanan wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi di Tapian Tabiang Barasok lebih menekankan pada keberlanjutan pengelolaan dibandingkan orientasi keuntungan jangka pendek.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep *Community Based Tourism* yang dikemukakan oleh Suansri, yang menjelaskan bahwa tujuan utama CBT adalah menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal melalui keterlibatan mereka dalam pengelolaan destinasi, penciptaan kesempatan kerja, serta distribusi manfaat ekonomi yang adil. Dalam konsep tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan pariwisata, tetapi juga menjadi pemilik sekaligus pengelola sumber daya wisata. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas wisata diharapkan mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan pengelolaan destinasi. Kondisi ini tercermin pada pengelolaan Tapian Tabiang Barasok yang mengutamakan pembangunan fasilitas wisata sebagai investasi jangka panjang agar manfaat ekonomi dapat terus dirasakan oleh masyarakat.[56]

Peningkatan pendapatan masyarakat yang diperoleh dari berkembangnya aktivitas wisata juga menunjukkan adanya efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian lokal. Keberadaan wisatawan mendorong munculnya berbagai aktivitas ekonomi, seperti usaha kuliner, penyediaan jasa parkir, penjualan produk lokal, serta berbagai usaha lain yang mendukung kebutuhan wisatawan. Walaupun peningkatan pendapatan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, keberadaan destinasi telah membuka alternatif mata pencaharian selain sektor pertanian yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan utama masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Pearce yang menyatakan bahwa sektor pariwisata mampu memberikan dampak ekonomi tidak langsung melalui berkembangnya berbagai usaha pendukung yang melibatkan masyarakat lokal. Semakin berkembang suatu destinasi wisata, maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui aktivitas usaha yang muncul di sekitarnya.[57]

Selain memberikan peluang usaha, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan Wisata Tapian Tabiang Barasok lebih mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal dalam seluruh kegiatan operasional. Pengelolaan kawasan, pemeliharaan fasilitas, kebersihan, pelayanan wisata hingga berbagai kegiatan pendukung lainnya dilaksanakan oleh masyarakat setempat melalui Pokdarwis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata lebih banyak dinikmati oleh masyarakat lokal dibandingkan pihak luar. Goodwin dan Santilli menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan CBT adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi pariwisata sehingga manfaat ekonomi tetap berputar di dalam komunitas (*local economic circulation*). Semakin besar keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi, maka semakin besar pula kontribusi pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.[58]

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani, mengenai penerapan *Community Based Tourism* di Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten

---

[56] Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Responsible Ecological Social Tours (REST), Thailand.

[57] Pearce, D. G. (1995). *Tourism Today: A Geographical Analysis*. Longman.

[58] Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). *Community-Based Tourism: A Success?* ICRT Occasional Paper No. 11.

Gunungkidul. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menjadi aktor utama dalam pengelolaan desa wisata, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas pariwisata sebagian besar dimanfaatkan kembali untuk pengembangan fasilitas, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan Desa Wisata Nglanggeran tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mengelola manfaat ekonomi untuk memperkuat keberlanjutan destinasi. Kondisi tersebut memiliki kesamaan dengan Tapian Tabiang Barasok, di mana pengelola lebih memprioritaskan penggunaan pendapatan wisata sebagai modal pembangunan dibandingkan membagikan keuntungan secara langsung kepada individu.[59]

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati mengenai implementasi *Community Based Tourism* pada beberapa desa wisata di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan CBT tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diterima masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola manfaat ekonomi untuk meningkatkan kualitas destinasi, memperkuat kelembagaan lokal, serta menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat. Menurut Ernawati, keberlanjutan ekonomi akan tercapai apabila hasil dari aktivitas pariwisata digunakan kembali sebagai investasi untuk pengembangan destinasi sehingga manfaat ekonomi dapat terus berlangsung dalam jangka panjang. Kondisi tersebut terlihat pada pengelolaan Tapian Tabiang Barasok yang mengalokasikan sebagian besar pendapatan wisata untuk pemeliharaan fasilitas, pembangunan sarana pendukung, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan.[60]

2. Prinsip Sosial

Pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi, adanya perbaikan kualitas hidup melalui peningkatan infrastruktur pendukung, tumbuhnya rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya, serta keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam pengelolaan wisata. Seluruh proses pengelolaan dilakukan secara bersama oleh masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata

[59] Andriani, Martono, & Muhammad. (2017). Penelitian mengenai implementasi CBT di Desa Wisata Nglanggeran.

[60] Ernawati, N. M. (2019). Publikasi tentang implementasi *Community Based Tourism* pada desa wisata di Indonesia.

(Pokdarwis) tanpa membedakan status gender maupun usia, sehingga setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai unsur utama dalam *Community Based Tourism* (CBT).

Temuan tersebut sejalan dengan konsep Community Based Tourism yang dikemukakan oleh Suansri, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan utama CBT adalah meningkatkan kualitas hidup (*quality of life*) masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam pembangunan pariwisata. Menurut Suansri, masyarakat harus memperoleh manfaat sosial berupa peningkatan akses terhadap fasilitas umum, kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, serta meningkatnya rasa memiliki terhadap destinasi wisata. Dalam penelitian ini, manfaat tersebut terlihat dari berkembangnya infrastruktur pendukung seperti perbaikan akses menuju kawasan wisata, peningkatan fasilitas umum, serta semakin tingginya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa. Keberadaan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat bagi wisatawan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari melalui tersedianya sarana yang lebih baik.[61]

Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan desa wisata mampu memberikan manfaat yang lebih luas daripada sekadar peningkatan pendapatan. Perbaikan akses jalan, penataan kawasan, serta pembangunan fasilitas pendukung memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi maupun sosial. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat Murphy yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas publik dan pembangunan lingkungan yang lebih baik. Dengan demikian, pengembangan Tapian Tabiang Barasok telah memberikan manfaat sosial yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan wisata.[62]

Selain meningkatkan kualitas hidup, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan wisata telah menumbuhkan rasa bangga (*community pride*) masyarakat terhadap daerahnya. Masyarakat merasa bangga ketika wisatawan dari berbagai daerah datang berkunjung karena hal tersebut menunjukkan bahwa potensi alam dan budaya yang dimiliki memiliki nilai dan daya tarik bagi

---

[61] Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Responsible Ecological Social Tours (REST), Thailand.

[62] Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A Community Approach*. New York: Routledge.

orang lain. Rasa bangga tersebut mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, memberikan pelayanan yang ramah kepada wisatawan, serta ikut mempromosikan Tapian Tabiang Barasok melalui berbagai media. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat Goodwin dan Santilli yang menjelaskan bahwa salah satu keberhasilan Community Based Tourism adalah tumbuhnya rasa memiliki (*sense of ownership*) dan kebanggaan masyarakat terhadap destinasi wisata yang mereka kelola. Semakin tinggi rasa bangga masyarakat, maka semakin besar pula komitmen mereka dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata.[63]

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati, yang menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata berbasis masyarakat mampu meningkatkan kohesi sosial, rasa percaya diri masyarakat, serta memperkuat identitas lokal. Masyarakat yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan destinasi akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keberlanjutan wisata dibandingkan masyarakat yang hanya menjadi penerima manfaat. Kondisi tersebut terlihat pada masyarakat Tapian Tabiang Barasok yang secara aktif terlibat dalam kegiatan gotong royong, pengelolaan kawasan wisata, hingga promosi destinasi. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan desa wisata telah menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat sehingga keberhasilan pengembangan wisata dipandang sebagai keberhasilan bersama. [64]

Aspek lain yang menjadi temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya kesempatan yang sama bagi perempuan dan generasi muda untuk terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Berdasarkan hasil wawancara, pembagian tugas dalam Pokdarwis tidak didasarkan pada jenis kelamin, melainkan pada kemampuan, minat, dan tanggung jawab masing-masing anggota. Perempuan berperan dalam administrasi, pelayanan wisata, serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, sedangkan generasi muda berkontribusi dalam promosi digital, dokumentasi, serta berbagai inovasi yang mendukung pengembangan destinasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan telah diterapkan dalam pengelolaan Wisata Tapian Tabiang Barasok. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Okazaki, yang menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan CBT adalah terbukanya kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan dan generasi muda, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun pengelolaan destinasi wisata. Partisipasi yang inklusif akan

---

[63] Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). *Community-Based Tourism: A Success?* ICRT Occasional Paper No. 11.

[64] Ernawati, N. M. (2019). Publikasi mengenai implementasi *Community Based Tourism* pada desa wisata di Indonesia.

memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan.[65]

Berdasarkan hasil penelitian, teori, dan penelitian terdahulu dapat dipahami bahwa penerapan prinsip sosial di Wisata Tapian Tabiang Barasok telah mencerminkan karakteristik utama *Community Based Tourism*. Hal tersebut ditunjukkan melalui meningkatnya kualitas hidup masyarakat, tumbuhnya rasa bangga terhadap daerah, serta diterapkannya prinsip kesetaraan dalam pengelolaan desa wisata melalui keterlibatan perempuan dan generasi muda tanpa adanya perbedaan status. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan juga memperkuat solidaritas sosial dan semangat gotong royong sebagai modal utama dalam menjaga keberlanjutan destinasi. Dengan demikian, prinsip sosial dalam pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dari aspek kesejahteraan sosial, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Community Based Tourism.

3. Prinsip Budaya

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip budaya dalam pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok menunjukkan bahwa masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berupaya menjadikan budaya lokal sebagai bagian penting dalam pengembangan destinasi wisata. Meskipun Tapian Tabiang Barasok lebih dikenal sebagai wisata alam, masyarakat tetap mempertahankan adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan aktivitas pariwisata dimanfaatkan sebagai media untuk memperkenalkan budaya lokal kepada wisatawan tanpa mengubah makna maupun nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, masyarakat juga tetap melibatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian budaya sehingga pengembangan pariwisata tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga identitas budaya lokal.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan konsep *Community Based Tourism* yang dikemukakan oleh Suansri, yang menjelaskan bahwa salah satu prinsip utama CBT adalah menghormati dan melestarikan budaya lokal sebagai identitas masyarakat. Dalam konsep tersebut, masyarakat memiliki peran utama dalam menjaga nilai-nilai budaya agar tidak mengalami perubahan yang

[65] Okazaki, E. (2008). *A Community-Based Tourism Model: Its Conception and Use*. Journal of Sustainable Tourism, 16(5), 511–529.

menghilangkan makna aslinya akibat perkembangan pariwisata. Keberadaan wisata seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat pelestarian budaya, bukan menjadi penyebab hilangnya identitas lokal. Temuan penelitian di Tapian Tabiang Barasok menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang teguh adat istiadat yang berlaku dan menjadikan budaya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga aktivitas pariwisata tidak menggeser fungsi budaya menjadi sekadar tontonan bagi wisatawan.[66]

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya upaya revitalisasi budaya melalui keterlibatan masyarakat dalam memperkenalkan tradisi, kuliner lokal, serta kebiasaan masyarakat kepada wisatawan. Walaupun belum terdapat pertunjukan budaya yang dilaksanakan secara rutin sebagai atraksi wisata, keberadaan desa wisata telah mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap pelestarian budaya yang dimiliki. Masyarakat menyadari bahwa budaya lokal merupakan salah satu daya tarik yang dapat memberikan nilai tambah bagi destinasi wisata. Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat Richards yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata berbasis budaya mampu mendorong masyarakat untuk menghidupkan kembali berbagai tradisi dan praktik budaya yang mulai jarang dilakukan sehingga budaya tetap lestari dan dikenal oleh generasi berikutnya. Dengan demikian, keberadaan pariwisata di Tapian Tabiang Barasok memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mempertahankan warisan budaya yang dimiliki.[67]

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat masih mampu mempertahankan keaslian budaya (*authenticity*) meskipun perkembangan pariwisata mulai memberikan sedikit pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pengaruh tersebut terlihat pada meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana promosi wisata serta adanya penyesuaian dalam penyampaian informasi budaya kepada wisatawan. Namun demikian, perubahan tersebut tidak sampai mengubah tata cara pelaksanaan adat maupun makna budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurut pengelola, setiap kegiatan adat tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak mengalami modifikasi secara berlebihan demi memenuhi kepentingan komersial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengembangan pariwisata dengan upaya mempertahankan keaslian budaya lokal.

---

[66] Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Responsible Ecological Social Tours (REST), Thailand.

[67] Richards, G. (2018). *Cultural Tourism: A Review of Recent Research and Trends*. Journal of Hospitality and Tourism Management, 36, 12–21.

Temuan tersebut sesuai dengan pendapat Cohen yang menjelaskan bahwa konsep *authenticity* dalam pariwisata tidak selalu berarti budaya harus benar-benar statis tanpa perubahan, tetapi lebih menekankan pada kemampuan masyarakat dalam mempertahankan nilai, makna, dan fungsi budaya meskipun terjadi interaksi dengan wisatawan. Dalam konteks Tapian Tabiang Barasok, masyarakat tetap membuka diri terhadap perkembangan pariwisata, namun tetap menjaga batas agar perubahan yang terjadi tidak menghilangkan identitas budaya yang dimiliki. Dengan demikian, sedikit pengaruh dari perkembangan wisata merupakan hal yang wajar selama masyarakat masih menjadi pihak yang menentukan bagaimana budaya tersebut dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.[68]

Selain menjaga keaslian budaya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelola telah berupaya memberikan edukasi kepada wisatawan mengenai norma dan adat istiadat yang berlaku di kawasan wisata. Meskipun belum tersedia *code of conduct* atau pedoman tertulis bagi wisatawan, pengelola dan anggota Pokdarwis secara langsung memberikan arahan kepada pengunjung mengenai pentingnya menjaga sopan santun, menghormati masyarakat setempat, menjaga kebersihan lingkungan, serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Edukasi tersebut dilakukan secara lisan ketika wisatawan memasuki kawasan wisata maupun pada saat berinteraksi dengan masyarakat. Upaya ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk melindungi budaya lokal dari perilaku wisatawan yang berpotensi mengganggu norma yang berlaku.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati, yang menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan Community Based Tourism tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga oleh keberhasilan masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya lokal sebagai daya tarik utama destinasi wisata. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki kontrol terhadap pengelolaan pariwisata cenderung lebih mampu menjaga keaslian budaya dibandingkan destinasi yang didominasi oleh pihak luar. [69]

Temuan yang serupa juga ditemukan pada penelitian Putra dan Pitana mengenai pengelolaan Desa Wisata Penglipuran di Bali, yang menunjukkan bahwa masyarakat tetap mempertahankan tata nilai adat, arsitektur tradisional, dan sistem kehidupan lokal

---

[68] Cohen, E. (1988). *Authenticity and Commoditization in Tourism*. Annals of Tourism Research, 15(3), 371–386.

[69] Ernawati, N. M. (2019). Publikasi mengenai implementasi *Community Based Tourism* pada desa wisata di Indonesia.

meskipun desa tersebut telah berkembang menjadi destinasi wisata yang dikenal secara luas. Kesamaan tersebut terlihat pada Tapian Tabiang Barasok, di mana masyarakat tetap mempertahankan adat dan budaya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sementara aktivitas pariwisata dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya tersebut kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.[70]

Berdasarkan hasil penelitian, teori, dan penelitian terdahulu dapat dipahami bahwa penerapan prinsip budaya di Wisata Tapian Tabiang Barasok telah mencerminkan karakteristik utama *Community Based Tourism.* Hal tersebut terlihat dari adanya upaya masyarakat dalam melestarikan tradisi dan budaya lokal, mempertahankan keaslian adat di tengah perkembangan pariwisata, serta memberikan edukasi kepada wisatawan agar menghormati norma dan nilai budaya setempat. Meskipun pengaruh perkembangan pariwisata mulai dirasakan, perubahan yang terjadi masih berada dalam batas yang wajar dan tidak menghilangkan esensi budaya masyarakat. Dengan demikian, pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok tidak hanya berfungsi sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menjadi media pelestarian budaya lokal sehingga nilai-nilai budaya tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang sesuai dengan prinsip *Community Based Tourism*.

4. Prinsip Lingkungan

Wisata Tapian Tabiang Barasok menunjukkan bahwa masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai daya tarik utama destinasi. Pengelolaan kawasan wisata dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemeliharaan lingkungan, seperti kerja bakti membersihkan kawasan wisata, pemeliharaan fasilitas, penataan lingkungan, serta penghijauan pada beberapa titik yang dianggap memerlukan penanaman pohon. Meskipun pengelolaan lingkungan masih dilakukan secara sederhana, masyarakat memiliki kesadaran bahwa keberlangsungan objek wisata sangat bergantung pada terjaganya kondisi alam. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan konsep *Community Based Tourism* yang dikemukakan oleh Suansri yang menyatakan bahwa salah satu prinsip utama CBT adalah menjaga kelestarian sumber daya alam sebagai aset utama dalam pembangunan

[70] Putra, I. N. D., & Pitana, I. G. (2010). Publikasi mengenai pengelolaan pariwisata budaya dan Desa Wisata Penglipuran, Bali.

pariwisata. Menurut Suansri, masyarakat sebagai pengelola destinasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas pariwisata tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat mengurangi kualitas destinasi di masa depan. Dalam konteks Tapian Tabiang Barasok, prinsip tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan, melakukan pemeliharaan lingkungan secara berkala, serta memanfaatkan hasil pariwisata untuk mendukung keberlanjutan kawasan wisata.[71]

Salah satu indikator dalam prinsip lingkungan adalah penerapan *carrying capacity* atau daya dukung kawasan wisata. Berdasarkan hasil penelitian, Tapian Tabiang Barasok belum menerapkan pembatasan jumlah pengunjung karena kawasan wisata masih memiliki area yang luas sehingga dinilai mampu menampung wisatawan tanpa menimbulkan kepadatan yang berlebihan. Pengelola menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kondisi yang menunjukkan terjadinya kerusakan lingkungan akibat tingginya jumlah kunjungan wisatawan. Namun demikian, Pokdarwis tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi kawasan, terutama pada waktu kunjungan meningkat seperti hari libur dan musim wisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun belum menerapkan kuota pengunjung, pengelola tetap memperhatikan daya dukung lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan destinasi.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Ceballos-Lascuráin yang menjelaskan bahwa konsep *carrying capacity* tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pembatasan jumlah wisatawan, tetapi dapat diterapkan melalui pengelolaan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas kawasan wisata. Apabila kondisi lingkungan masih mampu menampung aktivitas wisata tanpa mengalami penurunan kualitas, maka pengelola dapat lebih memfokuskan pengawasan pada perilaku wisatawan dan pemeliharaan lingkungan. Dengan demikian, keputusan Pokdarwis untuk tidak menerapkan pembatasan jumlah pengunjung dinilai sesuai dengan kondisi Tapian Tabiang Barasok yang masih memiliki ruang yang luas, selama pengawasan terhadap kelestarian lingkungan tetap dilakukan secara berkelanjutan.[72]

Dalam aspek pengelolaan limbah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Tapian Tabiang Barasok masih dilakukan secara manual. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas wisata dikumpulkan oleh masyarakat dan pengelola, kemudian dibersihkan secara rutin melalui kegiatan gotong royong.

---

[71] Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Responsible Ecological Social Tours (REST), Thailand.

[72] Ceballos-Lascuráin, H. (1996). *Tourism, Ecotourism and Protected Areas*. Gland, Switzerland: IUCN.

Pengelola mengakui bahwa hingga saat ini belum tersedia sistem pemilahan sampah yang modern maupun pengelolaan limbah yang terintegrasi. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan wisata. Kegiatan kerja bakti yang dilakukan secara berkala menjadi strategi utama dalam mempertahankan kebersihan lingkungan sehingga kawasan wisata tetap nyaman bagi wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Temuan tersebut didukung oleh penelitian Goodwin dan Santilli, yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan dalam Community Based Tourism sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam yang dimiliki.[73] Pada destinasi wisata berbasis masyarakat, pengelolaan lingkungan sering kali dilakukan melalui kegiatan kolektif seperti kerja bakti, pembersihan kawasan, dan pemeliharaan fasilitas umum. Penelitian Ernawati juga menunjukkan bahwa desa wisata yang dikelola oleh masyarakat cenderung lebih berhasil menjaga kualitas lingkungan apabila masyarakat memiliki rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap destinasi. Kondisi tersebut terlihat di Tapian Tabiang Barasok, di mana masyarakat secara sukarela terlibat dalam kegiatan kebersihan dan pemeliharaan kawasan sebagai bentuk tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan desa wisata.[74]

Selain menjaga kebersihan lingkungan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian pendapatan yang diperoleh dari aktivitas wisata dimanfaatkan untuk mendukung pemeliharaan kawasan dan kegiatan konservasi sederhana. Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki fasilitas yang rusak, menjaga kebersihan kawasan, melakukan penataan lingkungan, serta penanaman pohon pada beberapa lokasi yang membutuhkan penghijauan. Meskipun belum terdapat pos anggaran khusus untuk konservasi lingkungan, penggunaan pendapatan wisata untuk kegiatan pemeliharaan menunjukkan bahwa pengelola telah menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan destinasi. Kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dikemukakan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO), yaitu bahwa manfaat ekonomi

[73] Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). *Community-Based Tourism: A Success?* ICRT Occasional Paper No. 11.

[74] Ernawati, N. M. (2019). Publikasi mengenai implementasi *Community Based Tourism* pada desa wisata di Indonesia.

dari aktivitas pariwisata seharusnya digunakan kembali untuk menjaga kualitas lingkungan sebagai aset utama destinasi wisata.[75]

Wisata Tapian Tabiang Barasok telah mencerminkan karakteristik utama *Community Based Tourism*. Hal tersebut terlihat dari komitmen masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui kegiatan gotong royong, pengawasan terhadap kondisi kawasan, pengelolaan limbah secara kolektif, serta pemanfaatan sebagian pendapatan wisata untuk pemeliharaan lingkungan. Meskipun beberapa aspek, seperti penerapan sistem pengelolaan limbah modern dan penyusunan program konservasi yang lebih terstruktur, masih perlu dikembangkan, secara umum pengelolaan lingkungan di Tapian Tabiang Barasok telah menunjukkan adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan pariwisata dengan upaya pelestariannya. Dengan demikian, prinsip lingkungan dalam pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok telah mendukung terwujudnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip dasar *Community Based Tourism*.

5. Prinsip Politik

Wisata Tapian Tabiang Barasok menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan arah pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan masyarakat, Pokdarwis, tokoh masyarakat, dan pemerintah nagari. Setiap keputusan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas, penentuan program kerja, pengelolaan kawasan wisata, maupun penggunaan anggaran selalu dibahas secara bersama sebelum ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan pariwisata, tetapi juga menjadi subjek utama yang memiliki hak dalam menentukan kebijakan pengelolaan desa wisata. Dengan demikian, prinsip partisipasi masyarakat yang menjadi dasar Community Based Tourism telah diterapkan dalam pengelolaan Wisata Tapian Tabiang Barasok.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep *Community Based Tourism* yang dikemukakan oleh Suansri yang menyatakan bahwa masyarakat lokal harus memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya wisata yang dimiliki. Menurut Suansri, keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan merupakan salah satu syarat utama keberhasilan CBT karena masyarakat merupakan pihak yang paling

[75] United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2004). *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook*.

memahami kondisi, kebutuhan, serta potensi daerahnya sendiri. [76]Oleh sebab itu, pembangunan pariwisata seharusnya dilaksanakan secara partisipatif melalui forum musyawarah sehingga setiap keputusan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan masyarakat. Hasil penelitian di Tapian Tabiang Barasok menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah diterapkan melalui forum musyawarah yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan usulan, dan ikut menentukan arah pengembangan destinasi wisata.

Selain tingginya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh aset utama yang mendukung kegiatan pariwisata masih berada dalam penguasaan masyarakat lokal. Pengelolaan kawasan wisata dilakukan oleh Pokdarwis bersama masyarakat tanpa melibatkan investor maupun pihak luar dalam kepemilikan aset atau pengambilan kebijakan strategis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *local ownership* telah diterapkan dengan baik karena masyarakat memiliki kontrol penuh terhadap sumber daya wisata yang dimiliki. Kepemilikan lokal tersebut memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerah tanpa adanya tekanan dari kepentingan pihak eksternal.

Temuan tersebut sesuai dengan pendapat Goodwin dan Santilli yang menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan *Community Based Tourism* adalah tingginya tingkat kepemilikan lokal (*local ownership*) terhadap aset dan kegiatan pariwisata. Menurut Goodwin dan Santilli, kepemilikan lokal memungkinkan manfaat ekonomi, sosial, dan politik dari aktivitas pariwisata tetap berada di dalam komunitas sehingga masyarakat memiliki posisi yang kuat dalam mengendalikan arah pembangunan destinasi. Apabila kepemilikan wisata didominasi oleh investor luar, maka masyarakat berpotensi kehilangan hak dalam menentukan kebijakan serta memperoleh manfaat yang optimal dari aktivitas pariwisata. Oleh karena itu, dominasi kepemilikan masyarakat di Tapian Tabiang Barasok menjadi salah satu kekuatan utama dalam mewujudkan pengelolaan wisata berbasis masyarakat.[77]

Aspek lain yang menjadi temuan penting dalam penelitian ini adalah keberadaan kelembagaan Pokdarwis yang berfungsi sebagai organisasi pengelola desa wisata. Berdasarkan hasil wawancara, Pokdarwis telah memiliki struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang sesuai dengan fungsi masing-masing, serta mekanisme

---

[76] Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Responsible Ecological Social Tours (REST), Thailand.

[77] Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). *Community-Based Tourism: A Success?* ICRT Occasional Paper No. 11.

pelaporan keuangan kepada masyarakat melalui forum musyawarah. Setiap pemasukan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pengelolaan wisata dicatat oleh bendahara dan disampaikan secara terbuka kepada anggota maupun masyarakat yang berkepentingan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem pengelolaan yang dijalankan oleh Pokdarwis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Okazaki, yang menjelaskan bahwa keberhasilan Community Based Tourism tidak hanya ditentukan oleh tingginya partisipasi masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan yang mengelola destinasi wisata. Menurut Okazaki, kelembagaan yang memiliki struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang terarah, serta sistem pertanggungjawaban yang transparan akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat partisipasi dalam pengelolaan destinasi. [78] Penelitian Ernawati juga menunjukkan bahwa desa wisata yang memiliki kelembagaan lokal yang kuat cenderung lebih mampu mempertahankan keberlanjutan pengelolaan karena seluruh proses pembangunan dilakukan secara partisipatif dan akuntabel. Kondisi tersebut terlihat pada Tapian Tabiang Barasok, di mana Pokdarwis menjadi wadah utama yang mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan wisata bersama masyarakat.[79]

Penerapan prinsip politik di Wisata Tapian Tabiang Barasok telah mencerminkan karakteristik utama *Community Based Tourism*. Hal tersebut ditunjukkan melalui tingginya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, kuatnya kepemilikan lokal terhadap aset wisata, serta keberadaan kelembagaan Pokdarwis yang menjalankan fungsi organisasi secara transparan dan akuntabel. Seluruh proses pengelolaan dilakukan melalui musyawarah sehingga setiap kebijakan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama dan mencerminkan kepentingan masyarakat. Selain itu, tidak adanya keterlibatan investor luar dalam kepemilikan maupun pengambilan keputusan memperkuat posisi masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi wisata. Dengan demikian, prinsip politik dalam pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok telah mendukung terwujudnya tata kelola pariwisata yang demokratis, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip dasar *Community Based Tourism*.

---

[78] Okazaki, E. (2008). *A Community-Based Tourism Model: Its Conception and Use*. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511–529.

[79] Ernawati, N. M. (2019). Publikasi mengenai implementasi *Community Based Tourism* pada desa wisata di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok berbasis *Community Based Tourism* (CBT), dapat disimpulkan bahwa pengelolaan destinasi wisata telah menerapkan lima prinsip utama CBT, yaitu prinsip ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Penerapan kelima prinsip tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berperan sebagai aktor utama dalam proses pengelolaan dan pengembangan destinasi sehingga manfaat yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan desa wisata.

Pada prinsip ekonomi, pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Pengelolaan destinasi lebih mengutamakan pemberdayaan tenaga kerja setempat, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas wisata sebagian besar dialokasikan kembali untuk pembangunan, pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan kawasan wisata. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa

pengelolaan ekonomi telah berorientasi pada keberlanjutan destinasi sehingga manfaat pariwisata dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Pada prinsip sosial, keberadaan Wisata Tapian Tabiang Barasok memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan infrastruktur pendukung, tumbuhnya rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Pengelolaan wisata dilakukan secara inklusif tanpa membedakan jenis kelamin maupun usia, sehingga perempuan dan generasi muda memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pengelolaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kondisi tersebut memperkuat solidaritas sosial, semangat gotong royong, dan rasa memiliki masyarakat terhadap desa wisata.

Pada prinsip budaya, masyarakat tetap mampu mempertahankan adat istiadat, nilai-nilai budaya, serta identitas lokal meskipun aktivitas pariwisata mulai memberikan sedikit pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut masih berada dalam batas yang wajar dan tidak mengubah makna maupun pelaksanaan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, pengelola juga berupaya memberikan edukasi kepada wisatawan mengenai norma dan adat istiadat setempat

agar aktivitas wisata tetap menghormati nilai-nilai budaya masyarakat. Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya menjadi sarana peningkatan ekonomi, tetapi juga mendukung pelestarian budaya lokal.

Pada prinsip lingkungan, masyarakat bersama Pokdarwis telah menunjukkan komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui kegiatan gotong royong, pembersihan kawasan wisata, pemeliharaan fasilitas, serta penghijauan di beberapa titik kawasan wisata. Meskipun belum diterapkan pembatasan jumlah pengunjung karena kawasan wisata masih memiliki daya tampung yang luas dan sistem pengelolaan limbah masih dilakukan secara manual, pengelola tetap berupaya menjaga kebersihan kawasan dan mengalokasikan sebagian pendapatan wisata untuk mendukung pemeliharaan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan lingkungan telah menjadi bagian dari pengelolaan desa wisata.

Pada prinsip politik, masyarakat memiliki peran yang sangat dominan dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan Pokdarwis, tokoh masyarakat, pemerintah nagari, dan masyarakat setempat. Seluruh aset utama wisata dikelola oleh masyarakat tanpa adanya kepemilikan maupun intervensi investor dari luar daerah. Selain itu, Pokdarwis telah memiliki struktur organisasi yang jelas serta

menerapkan sistem pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola desa wisata telah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepemilikan lokal sesuai dengan konsep Community Based Tourism.

Secara keseluruhan, strategi pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok telah mencerminkan implementasi Community Based Tourism yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan destinasi. Penerapan kelima prinsip CBT saling mendukung dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yaitu melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan kehidupan sosial, pelestarian budaya lokal, perlindungan lingkungan, serta tata kelola yang partisipatif dan transparan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti pengembangan sistem pengelolaan limbah yang lebih baik, penyusunan pedoman tertulis (*code of conduct*) bagi wisatawan, serta penguatan program konservasi lingkungan. Dengan melakukan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, Wisata Tapian Tabiang Barasok diharapkan mampu berkembang menjadi destinasi wisata berbasis masyarakat yang lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pengembangan Wisata Tapian Tabiang Barasok berbasis *Community Based Tourism* (CBT), maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Pengelola bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan prinsip *Community Based Tourism* melalui pelibatan aktif masyarakat dalam setiap proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan desa wisata. Selain itu, pengelola juga perlu meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, seperti pengelolaan sampah yang lebih baik, penyusunan *code of conduct* bagi wisatawan, serta penguatan program pelestarian lingkungan agar keberlanjutan destinasi tetap terjaga.
2. Pengelola diharapkan terus mengembangkan kualitas destinasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital sebagai media promosi, serta pengembangan fasilitas wisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, nilai-nilai budaya, dan karakteristik lokal sehingga daya saing Wisata Tapian Tabiang Barasok dapat terus meningkat.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai *Community Based Tourism* dengan menggunakan pendekatan, metode, atau variabel yang berbeda serta melibatkan informan yang lebih beragam. Penelitian komparatif dengan desa wisata lain juga dapat dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi pengembangan desa wisata berbasis masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.

And Finance Volume 2 Issue 1, 2024 Page 36-43.

Andriani, Martono, & Muhammad. (2017). Penelitian mengenai implementasi CBT di Desa Wisata Nglanggeran.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. : Jakarta Rhineka Cipta.

Asker, S., Boronyak, L., Carrard, N., & Paddon, M. (2010). *Effective Community Based Tourism: A Best Practice Manual*. Sustainable Tourism CRC.

Baskoro, BRA., dan Rukendi, Cecep. (2008). Membangun Kota Pariwisata Berbasis Komunitas: Suatu Kajian Teoris.J Kepariwisataan.:3(1):37-50.

Ceballos-Lascuráin, H. (1996). *Tourism, Ecotourism and Protected Areas*. Gland, Switzerland: IUCN.

Cohen, E. (1988). *Authenticity and Commoditization in Tourism*. Annals of Tourism Research, 15(3), 371–386.

Cole, S. (2006). *Information and empowerment: The keys to achieving sustainable tourism*. Journal of Sustainable Tourism, 14(6), 629-644.

Demartoto, A. (2009). Community Based Tourism Development.

Denman, R. (2001). *Guidelines for Community-based Ecotourism Development*. WWF International.

Diana dan Setiawan. Community-Based Tourism sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal di kawasan wisata pesisir. Jurnal Pariwisata Indonesia, 2021. 16(1), 45–58.

Ernawati, N. M. (2019). Publikasi mengenai implementasi *Community Based Tourism* pada desa wisata di Indonesia.

Fatimah Andi Maoudy. A dkk. (2025). *Perencanaa Destinasi Pariwisata.* Yogyakarta : Pt Star Digital Publishing.

Fauziyah Eddyono. (2021). *Pengelolaan Destinasi Pariwisata.* Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia.

Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). *Community-Based Tourism: A Success?* ICRT Occasional Paper No. 11.

Hasana Fadila. Pengembangan Sektor Pariwisata untuk meningkatkan Pendapata Daerah Di Indonesia. Journal Of Business, Economics,

Hermawan, Hary. *Buku Panduan Wisata Edukasi Kampung Tulip*. Bandung Kabupaten Gunungkidul, DIY) (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Pedoman Jejaring Desa Wisata (Jadesta)*. Kemenparekraf RI.

Khalda Khairunnisa Syafiqah. (2020). Implementasi Konsep Community Based Tourism (CBT) Dalam Mendukung Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan pada Destinasi Wisata Sanghyang Kenit di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pencinta Alam dan Lingkungan*, Vol. 1, No.2.

Muljadi, (2010). *Kepariwisatan dan Perjalanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Nurwanto. (2020). Evaluasi Dampak Pembangunan Pariwisata Menggunakan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Kawasan Wisata Tebing Breksi. *Juranal Kepariwisataan Indonesia*. Vol 14. No 2.

Okazaki, E. (2008). *A Community-Based Tourism Model: Its Conception and Use*. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511–529.

Oka, A. Yoeti. *(2002). Perencanaan Strategi Pemasaran Daerah Tujuan Wisata, Jakarta:PT.Pradya Paramita.*

Paturusi, Syamsul Alam. (2008). Perencanaan Kawasan Pariwisata, Denpasar: Udayana University Press.

Pearce, D. G. (1995). *Tourism Today: A Geographical Analysis*. Longman.

Prasiasa, Dewa P. O. 2013. Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat. Jakarta:Salemba Humanika.

Purnomo, Rochmat Aldy dkk. 2009. *Pendapatan ekonomi, uang dan bank*. Jakarta: Graha Ilmu.

Putra, I. N. D., & Pitana, I. G. (2010). Publikasi mengenai pengelolaan pariwisata budaya dan Desa Wisata Penglipuran, Bali.

Rahma, Femi Nadia dan Herniwati Retno Handayani. 2013. *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata Dan Pendapatan PerkapitaTerhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus.Diponegoro* Journal of Economic. Volume 2, No. 2.

Richards, G. (2018). *Cultural Tourism: A Review of Recent Research and Trends.* Journal of Hospitality and Tourism Management, 36, 12–21.

Rinaldi, Soni Faisal. 2017. *Metodologi Penelitian dan Statistik.*

Rohim. A. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa

Scheyvens, R. (2002). *Tourism for Development: Empowering Communities*. Pearson Education.

Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. REST Project.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunaryo, Bambang. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media.

Suprayogi Boy. (2020). Community Based Tourism (CBT) Sebagai Konsep Pengembangan Pariwisata Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Riau.

Surur, Fadhil. 2020. *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi*. Makasar: Alauddin University Press.

Suwena, I Ketut dkk. 2017. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan.

Tjiptono, Fandy. 2017. *Pemasaran Jasa*, Malang:Bayumedia Publishing.

Tosun, C. (2001). *Challenges of sustainable tourism development in the developing world: the case of Turkey*. Tourism Management, 22(3), 289-303.

Tresiana dan Duadji. (2018). A participation model based on community foru as a resproductive health knowledge transaction space to increase male participation in vasectomy. Masyarakat, kebudayaan dan politik, Vol 31, No.1 (2018) 31 (1), 1-13, 2018.

Unggul Priyadi. (2016). *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Warpani, Ahmad dan Indira Warpani. (2007). Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah Bandung: ITB. Wisata (Studi di Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo,

UNWTO (World Tourism Organization). (2004). *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook*. UNWTO.

DOKUMENTASI








SMS